

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



2019

Jateng
gayeng



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

Jateng
gayeng



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya penyusunan LKjIP sebagai salah satu komponen SAKIP, bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja pejabat publik atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tetuang dalam RPJMD.

Berbekal semangat dan kerja keras serta niat luhur untuk mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun pertama telah berhasil mewujudkan capaian kinerja sasaran strategis pembangunan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKjIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan, agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Semarang, Maret 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. PEMUDA 127-133 TELP. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
SEMARANG 50132

Email: inspektorat@jatengprov.go.id, Web: inspektorat.jatengprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, 17 Maret 2020

**INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH**



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611226 198303 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	1
C Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur.....	6
D Perangkat Daerah dan Sumber Daya Aparatur.....	8
E Isu Strategis Daerah.....	11
F Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A Perencanaan Strategis.....	17
B Program Unggulan.....	21
C Tujuan dan Sasaran.....	25
D Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
E Program Untuk Mencapai Sasaran.....	48
F Rencana Kinerja Tahunan 2019.....	49
G Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	50
H Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.....	50
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A Metode Pengukuran Capaian Kinerja 2019	53
B Capaian Kinerja Organisasi.....	54
C Analisis Capaian Kinerja Tujuan	55
D Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	69
E Akuntabilitas Anggaran.....	91
BAB IV : PENUTUP	
A Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....	99
B Progres Penyelesaian Isu Strategis	100
LAMPIRAN :	
1. Tabel Analisis	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1	Karakteristik Wilayah Jawa Tengah..... 5
Tabel	1.1	Karakteristik Wilayah Jawa Tengah..... 6
Tabel	2.1	Skema Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja..... 28
Tabel	2.2	Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019..... 49
Tabel	3.1	Kriteria Penilaian 55
Tabel	3.2	Kriteria Penilaian 55
Tabel	3.3	Perbandingan Realisasi IKU 2017-2019..... 56
Tabel	3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1..... 71
Tabel	3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1..... 72
Tabel	3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2..... 73
Tabel	3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3..... 75
Tabel	3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1..... 76
Tabel	3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2..... 78
Tabel	3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1..... 81
Tabel	3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1..... 85
Tabel	3.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2..... 87
Tabel	3.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.3..... 89
Tabel	3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2.1..... 90
Tabel	3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2.2..... 91
Tabel	3.16	Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019..... 93
Tabel	3.17	Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten /Kota di Jawa Tengah..... 96
Tabel	3.18	Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah..... 97
Tabel	3.19	Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan per Kabupaten/Kota..... 98



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	2
Gambar 1.2 Peta Topografi Jawa Tengah.....	3
Gambar 1.3 Peta Daerah Aliran Sungai.....	4
Gambar 1.4 Jumlah Penduduk masing-masing Kab /Kota di Jawa Tengah.....	6
Gambar 1.5 Komposisi PNS Provinsi Jawa Tengah 2019.....	11
Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah Tahun 2018-2023.....	25
Gambar 2.2 Skema Strategi Pencapaian Misi.1.....	32
Gambar 2.3 Skema Strategi Pencapaian Misi.2.....	34
Gambar 2.4 Skema Strategi Pencapaian Misi.3.Tujuan 1.....	39
Gambar 2.4 Skema Strategi Pencapaian Misi.3.Tujuan 2.....	59
Gambar 2.5 Skema Strategi Pencapaian Misi.4.....	44
Gambar 2.6 Pengintegrasian e-SAKIP ke dalam Sistem GRMS.....	51
Gambar 2.7 Aplikasi SIM Kepegawaian.....	52
Gambar 3.1 Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2017-2019.....	76
Gambar 3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.....	96
Gambar 3.3 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.....	98



DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik	3.1	Perbandingan rata-rata realisasi IKU..... 57
Grafik	3.2	Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 1..... 58
Grafik	3.3	Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 2..... 61
Grafik	3.4	Capaian Tujuan 1 dan Sasaran Misi 3..... 64
Grafik	3.5	Capaian Tujuan 2 dan Sasaran Misi 3..... 66
Grafik	3.6	Capaian Tujuan 1 dan Sasaran Misi 4..... 68
Grafik	3.7	Capaian Tujuan 2 dan Sasaran Misi 4..... 70
Grafik	3.8	Predikat SAKIP 2017-2019 Prov. Jateng..... 74
Grafik	3.9	Predikat SAKIP Kab/Kota 2019..... 74
Grafik	3.10	Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)..... 77
Grafik	3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah per Agustus 2019..... 80
Grafik	3.12	Capaian Kinerja Sasaran 3.2.1 Tahun 2019..... 84
Grafik	3.13	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017 – 2019..... 86
Grafik	3.14	Angka Harapan Hidup dari tahun 2017-2019.... 88
Grafik	4.1	Perbandingan Capaian IKU, Tujuan dan Sasaran Tahun 2019..... 100
Grafik	4.2	Progres Penyelesaian Isu Kemiskinan..... 102
Grafik	4.3	Kualitas dan Daya Saing SDM..... 103
Grafik	4.4	Daya Saing Ekonomi..... 104
Grafik	4.5	Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam..... 105
Grafik	4.6	Kedaulatan Pangan dan Energi..... 106
Grafik	4.7	Kesenjangan Wilayah..... 107
Grafik	4.8	Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah..... 107



BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, merupakan laporan tertulis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2019. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkelanjutan.

B. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di 5040' - 8030' Lintang Selatan dan 108030' - 111030' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Biro Pemotda 2020

2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2
Peta Topografi Jawa Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

3. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi tujuh klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dangromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat enam gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara) dan Gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

4. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak. Beberapa DAS yang menjadi DAS Prioritas di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS



Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai II – 4 Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi enam Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Banyumas, dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dengan panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 12-25 m, peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber : *Badan Informasi Geospasial, 2020*

5. Klimatologi

Iklim di Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Pada tahun 2019, suhu udara di Jawa Tengah berkisar 21-32°C dengan kelembaban udara berada pada kisaran 70%-85%. Curah hujan tertinggi yang tercatat di Stasiun Meteorologi Sempor, Kebumen yaitu sebesar 1.320 mm. Sedangkan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun SMPK, Borobudur Magelang 64 hari.



Tabel 1.1
Karakteristik Wilayah Jawa Tengah

Letak Astronomis	5°40' - 8°30' LS 108°30' - 111° 30' BT
Letak Geografis	
• Batas Timur	Provinsi Jawa Timur
• Batas Barat	Provinsi Jawa Barat
• Batas Utara	Laut Jawa
• Batas Selatan	Provinsi DI Yogyakarta
Luas Wilayah	32.544,12 Km ²
Suhu Udara	
• Rata-rata	21-32° C
• Minimum	20° C
• Maximum	36° C
Kelembaban Udara	
Banyaknya hari hujan	
Banyaknya curah hujan	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

6. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan). Jumlah penduduk Jawa Tengah per Januari 2020 adalah sebesar 34,55 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah terbesar di Kabupaten Brebes dan Kota Semarang sebanyak 1,8 juta jiwa, kemudian Kabupaten Cilacap dan Banyumas sebesar 1,7 juta jiwa. Secara nasional, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat (49 juta jiwa) dan Jawa Timur (39,74 juta jiwa).

Perkembangan jumlah penduduk Jawa Tengah relatif terkendali, hal ini terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun 2017 angka TFR Jawa Tengah sebesar 2,3, menurun dibandingkan angka sebagaimana Gambar 1.4



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Dilihat dari distribusi penduduk per Kabupaten/Kota, dapat dilihat bahwa kabupaten dengan penduduk paling banyak yaitu Kabupaten Brebes sejumlah 1.796.004 jiwa, selanjutnya Kota Semarang 1.757.686 jiwa, dan Kab.Cilacap 1.711.627 jiwa.

C. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur

a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang dan kewajiban pelaksanaan otonomi daerah Gubernur memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut :

a.1 Tugas Gubernur Sebagai Kepala Daerah

- 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada



DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- 4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.2 Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah

- 1) mengajukan rancangan Perda;
- 2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
- 4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.3 Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

- 1) mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- 3) memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- 4) melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
- 6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.4 Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

- 1) membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;



- 2) memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;
- 4) memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana tersebut di atas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas sekaligus kewenangan yang harus dilaksanakan , yaitu :

1. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
3. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
4. melantik Bupati/Walikota;
5. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklatur nya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah Provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



D. Perangkat Daerah Dan Sumber Daya Aparatur

a. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tentang penataan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Gubernur, antara lain:

a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Pergub tersebut, Sekretariat Daerah terdiri dari tiga Asisten dan sembilan Biro, yaitu :

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan :
 - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - Biro Hukum;
 - Biro Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
 - Biro Perekonomian;
 - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
 - Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Asisten Administrasi, mengkoordinasikan :
 - Biro Organisasi;
 - Biro Umum;
 - Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 s.d 77 dan 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan;



- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Dinas Perhubungan;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - 15) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 17) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - 18) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
 - d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
 - e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
 - f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 - g) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 s.d 93 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 6) Badan Penghubung.
 - h) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
 - i) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - j) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD), terdiri :

- 1) RSUD Dr. Moewardi ;
- 2) RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo;
- 3) RSUD Tugurejo;
- 4) RSUD Kelet .

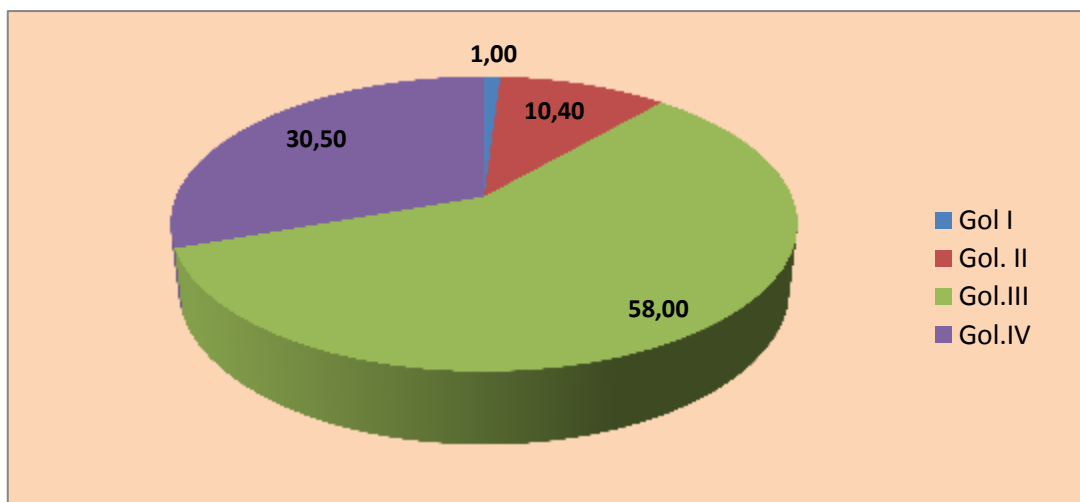
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD), terdiri :

- 1) RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- 2) RSJD Surakarta;
- 3) RSJD Dr. RM Soedjarwadi.

b. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, seiring dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah semula 59 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi 49 OPD. Jumlah pegawai yang berstatus PNS semula 41.683 orang per Desember 2019, menjadi 41.752 orang pada Januari 2020. Dari jumlah tersebut PNS golongan I sebanyak 438 orang atau 1%, PNS golongan II sebanyak 4327 orang atau 10,40%, PNS golongan III dan 24236 atau 58%, dan untuk PNS golongan IV sebanyak 12751 orang atau 30,50%. Terlihat secara jelas bagaimana dalam gambar 1.5 dibawah ini :

Gambar 1.5
Komposisi PNS Provinsi Jawa Tengah 2019



Sumber Data BKD Provinsi Jawa Tengah 2019

E. Isu Strategis Daerah

Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu



strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1) Penanggulangan Kemiskinan

- a) Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil).
- b) Masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak huni, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

2) Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

- a) Angka IPM Jawa Tengah masih dibawah angka nasional sebesar 71,73 dengan indikator angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, masih di bawah rata-rata provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional.
- b) Tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif.
- c) Masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian di Jawa Tengah.
- d) Melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Jawa Tengah.
- e) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- f) Implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali
- g) Meluncurnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme.

3) Daya Saing Ekonomi Dan Peningkatan Kesempatan Berusaha

- a) *Sektor Industri Pengolahan*
 - Industri yang berkembang masih didominasi oleh industri padat karya.
 - Ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor.



- Ketersediaan energi dalam rangka pengembangan industri di Jawa Tengah.
 - Ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang masih rendah.
- b) *Sektor Perdagangan dan Jasa*
- Rendahnya ekspor antar daerah, dan pasar ekspor yang masih terbatas pada pangsa pasar konvensional.
 - Lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha.
 - Tren pengembangan *e-commerce* juga belum dibarengi kemampuan sumber daya manusia dalam pemanfaatan *e-commerce* tersebut.
 - Pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah yang belum menekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*Eco Socio Tourism*), dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan, laut, sungai, karts, danau, dan pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata.
 - Pengembangan pariwisata yang belum menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.
- c) *Sektor Pertanian*
- Sektor pertanian makin terdesak dan menurun kontribusinya pada PDRB dari tahun ke tahun.
 - Makin berkurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan.
 - Terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri
- d) *Investasi*
- Belum optimalnya kecepatan pelayanan perijinan, promosi investasi yang belum optimal, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi yang belum optimal, didukung dengan pelayanan birokrasi yang belum efisien dan penggunaan teknologi belum optimal.



- Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata di Jawa Tengah, khususnya di wilayah perbatasan barat dan timur, serta wilayah selatan.
- Belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dengan dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, sehingga perlu peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah.

4) Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

- a) Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- b) Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah, yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air (*catchment area*), pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir /mangrove untuk tambak.
- c) Tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan dan serta konflik satwa liar dengan masyarakat, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.
- d) Peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah.
- e) Masih maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang berpotensi merusak lahan.
- f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengolahan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.
- g) Kerusakan sumber daya pesisir, adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove karena beberapa varietas



mangrove tidak bisa beradaptasi, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), dan konflik sosial terkait pengkaplingan lahan tambak yang menyulitkan pengelolaan, dan kurangnya SDM yang terlibat baik masyarakat dan aparat.

- h) Pemanfaatan pesisir yang tidak sesuai dengan peruntukannya (sebagian wilayah dimiliki oleh masyarakat/pihak tertentu dengan hak ijin guna pakai), serta adanya penambangan di wilayah pesisir dan pantai (pasir laut).
- i) Meningkatnya frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dari tahun ke tahun.

5) Kedaulatan Pangan dan Energi

- a) Menyempitnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menurunnya persediaan dan produksi pangan.
- b) Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah.
- c) Masih adanya kecenderungan ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang.
- d) Masih terbatasnya Pelayanan energi (listrik dan migas) serta belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal.

6) Kesenjangan Wilayah

Masih cukup banyak Kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding Kabupaten/Kota dan kesenjangan antara wilayah desa dan kota di Jawa Tengah.

7) Tata Kelola Pemerintahan Dan Kondusivitas Wilayah

- a) Belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Jawa Tengah.
- b) Kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019, disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.

Untuk mendukung melaksanakan misi dan mencapai visi Pemerintah Provinsi Jawa Tahun 2018-2023, telah ditetapkan enam tujuan dan 12 sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

a. Visi Dan Misi Provinsi Jawa Tengah

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “



Untuk mewujudkan Visi Provinsi Jawa Tengah ditetapkan **Misi** sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah Yang Religius, Toleran dan Guyup Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan - gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis Serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan



dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsive diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan / organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terimplementasikan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi



yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumberdaya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah Kabupaten/Kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.



B. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu:

1. Sekolah Tanpa Sekat; Pelatihan Tentang Demokrasi dan Pemilu, Gender, Anti Korupsi dan Magang Gubernur Untuk Siswa SMA/SMK;

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

2. Peningkatan Peran Rumah Ibadah, Fasilitas Pendakwah dan Guru Agama;

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

3. Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi;

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

4. Satgas Kemiskinan, Bantuan Desa, Rumah Sederhana Layak Huni;

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

Bantuan desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan



masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5. Obligasi Daerah, Kemudahan Akses Kredit UMKM, Penguatan BUMDes dan Pelatihan *Startup* Untuk Wirausaha Muda;

Program unggulan obligasi daerah dilatar belakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah.

Program ekonomi lainnya adalah program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa. Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan *startup* wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja.

6. Menjaga Harga Komoditas dan Asuransi Gagal Panen Untuk Petani Serta Melindungi Kepentingan Nelayan;

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan



penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya. Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar.

7. Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi;

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan/*Bus Rapid Transit* (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah. Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

8. Pembukaan Kawasan Industri Baru dan Rintisan Pertanian Terintegrasi;

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi *holistic* perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (*food, feed, fuel, fertilizer, fiber*). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (*mayor sektoral*) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.



9. Rumah Sakit Tanpa Dinding, Sekolah Biaya Pemerintah Khusus Untuksiswa Miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan Bantuan Sekolah Swasta, Ponpes, Madrasah dan Difabel;

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Selain itu program lainnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan.

10. Festival Seni Serta Pengembangan Infrastruktur Olahraga, Rumah Kebudayaan dan Kepedulian Lingkungan;

Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang



terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan meningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

Gambar 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah
Tahun 2018-2023



C. Tujuan Dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan



sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 dari empat Misi yang ada, meliputi enam tujuan dan 12 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi ini memiliki tujuan menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup, dengan sasaran terciptanya kohesi sosial masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penurunan kejadian konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah, dengan indikator sasaran adalah indeks toleransi dan persentase tindak pidana yang tertangani.

2. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Misi kedua bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari tiga hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

3. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ketiga ini memiliki dua tujuan yaitu: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah Persentase kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

4. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Misi ini bertujuan untuk: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan



indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender; 4) meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, dibawah ini :



Tabel .2.1
SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup		Persentase penurunan konflik SARA	15,00
			Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	74,40
				Persentase tindak pidana yang tertangani	80,00
2	Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)		Indeks Reformasi Birokrasi	75,50
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,76
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	80,00
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,45
			Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Opini BPK	WTP
				Nilai Kematangan Organisasi Daerah	17,00
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		Indeks Sistem Merit	0,67
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawa	Angka Kemiskinan	10,57-9,57
				Persentase penduduk miskin perkotaan	9,54
				Persentase penduduk miskin perdesaan	12,74
				Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20 % berpenghasilan terendah	464,81
				Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT	60,85



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				20% berpenghasilan terendah	30,75
				Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	
			Menurunnya Pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43
				Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	5,70
		Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan		Pertumbuhan Ekonomi	5,3- 5,7
				Inflasi	3,5±1
				PDRB per kapita	37,44
				Indeks Williamson	0,60
			Meningkatnya Pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan sector pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,90
				Pertumbuhan sector industri pengolahan	4,85
				Pertumbuhan sector perdagangan dan jasa	5,67
				Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	3,15
				Pertumbuhan inves	9,00
				Nilai Tukar Petani	101,20
4	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,60
				Rata-rata Lama Sekolah	7,31
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Harapan Lama Sekolah	12,84
				Angka Harapan Hidup	74,09



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kesehatan masyarakat		
			Meningkatnya Akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,00
		Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,69
			Meningkat nya Kualitas air,udara, sertatutupan lahan	Indeks Kualitas Air	48,77
				Indeks Kualitas Udara	84,51
				Indeks Tutupan Lahan	66,76
			MeningkatnyaKetahanan daerah dalam Penanggulanganbencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	3,52



D. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan melalui empat misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu lima tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, pluralisme, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu persentase penurunan konflik bernuansa SARA, melalui penciptaan kohesi sosial di masyarakat, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu:

- a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- b. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Salah satu program unggulan yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, yang merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat. Program tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi politik bagi masyarakat yang



mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Edukasi politik bagi masyarakat juga akan mendorong inisiatif masyarakat untuk mampu menyelesaikan permasalahan, menjawab tantangan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta menegaskan bahwa Negara milik rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup, juga dilakukan upaya peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama. Program ini adalah sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

Gambar 2.2
Skema Strategi Pencapaian Misi 1



2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Selama tahun 2013-2018 capaian reformasi birokrasi yang paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat pada tempat yang terhormat dimana ruang rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan arah dan pengawasan pembangunan menjadi semakin terbuka.

Pada gilirannya partisipasi masyarakat mampu mendorong reformasi birokrasi yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat secara dinamis. Birokrasi telah ditempatkan sebagai subyek



reformasi yang mendapatkan manfaat (*benefit*) dari reformasi itu sendiri, serta juga telah berhasil meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi, dan akuntabel.

Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi di Jawa Tengah tetap dilandaskan pada nilai utama “*tetep mboten korupsi, mboten ngapusi*”, yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Cakupan penguatan reformasi birokrasi tidak hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga semakin diperluas sampai ke pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari tiga hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*road show*);
- b. meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui: a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;

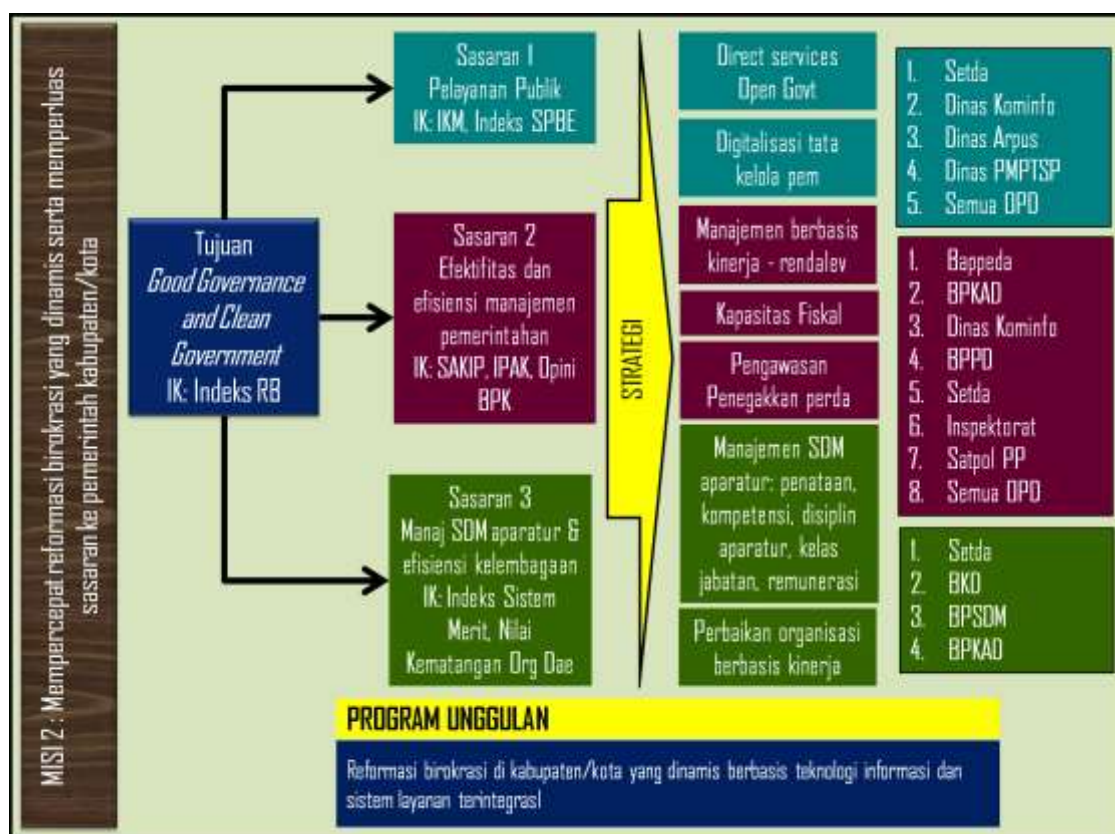


- d. peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, penguatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
- e. mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik, melalui: a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penerapan sistem renumerasi, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan *talent scouting* (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (*output*) tetapi juga dampak (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran misi kedua ini didukung dengan program unggulan reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Program ini ditunjukkan tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya sampai pada tataran pemerintah provinsi tetapi juga hingga level pemerintah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.



Gambar 2.3
Skema Strategi Pencapaian Misi 2



3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2018 merupakan penurunan tertinggi selama kurun waktu lima tahun, bahkan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penurunan ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun tidak tumbuh tinggi sebagaimana provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin berkualitas dan inklusif. Untuk itu, pembangunan ekonomi Jawa Tengah lima tahun kedepan juga didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas. Artinya bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk semakin banyak melibatkan masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas kontribusi mereka. Kapabilitas individual ataupun kelompok masyarakat akan semakin meningkat dan merata secara bersama-sama sehingga akan mempersempit kesenjangan antar pelaku ekonomi. Disisi lain, pembangunan ekonomi ke depan juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial dan



budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.

Dengan pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif, diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dan gotong royong dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian kondisi tersebut, maka strategi yang akan dilakukan sebagai berikut. Tujuan kesatu adalah menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran meliputi: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan 2) menurunnya pengangguran terbuka. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, dengan upaya diantaranya:
 - 1) meningkatkan akses pendidikan berupa Beasiswa Siswa Miskin (BSM), penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding School*, penyelenggaraan SMK Negeri *Semi Boarding* di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, Sekolah Tanpa Sekat, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, pemantapan pendidikan karakter, serta vokasi bidik miskin;
 - 2) peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat dan rumah sakit tanpa dinding;
 - 3) stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan dan pemberian bantuan sumber pangan lainnya;
 - 4) bantuan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik. Bantuan stimulan RSLH untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat; memperluas akses pembiayaan; serta sinergi penanganan dengan pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, CSR, Baznas, dan lainnya;
 - 5) pemberian Kartu Jateng Sejahtera, dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS melalui peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif dan terlantar, penyiapan



- bimbingan sosial bagi fakir miskin, serta peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- 6) kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan;
 - 7) meningkatkan penggunaan MKJP melalui advokasi kepada masyarakat; kemitraan dengan perusahaan, TNI, Polri, dan ormas, serta dengan upaya pengembangan Kampung KB.
- b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui:
- 1) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha, diantaranya dengan menyambungkan informasi tentang program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;
 - 2) Pengembangan *startup* wirausaha baru melalui pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya lokal/permintaan pasar/wirausaha pemula dan pelatihan penumbuhan wirausaha baru termasuk bagi pemuda, perempuan rentan dan penumbuhan ekonomi pesantren (ekotren);
 - 3) Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil termasuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).
- c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu; penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, didukung pendampingan yang kontinyu, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan; peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dalam satu lembaga Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan.



d. Menurunkan pengangguran melalui upaya:

- 1) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, daya saing, dan jiwa kewirausahaan tinggi, yang *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perekonomian kedepan melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan penguatan program *link and match* melalui pengembangan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan industri Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI);
- 2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan industri dengan *supply chain* dari UMKM lokal, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;
- 3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

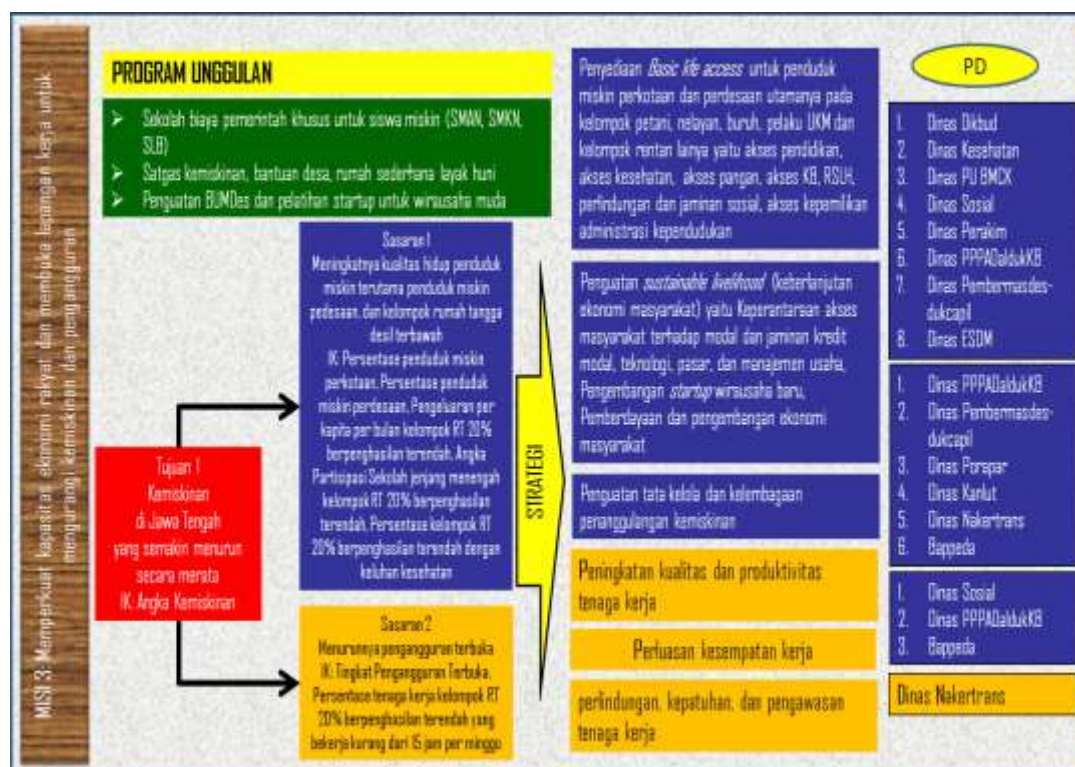
Strategi tersebut didukung dengan program unggulan daerah yaitu:

- a. Satgas kemiskinan, yang secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan;
- b. Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- c. Rumah sederhana layak huni, dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat;
- d. Penguatan BUMDes, melalui peningkatan peran, dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa;



- e. Pelatihan *startup* untuk wirausaha muda, merupakan program daerah untuk mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja;
- f. Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB), merupakan sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaannya operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh.

Gambar 2.4
Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 1



Tujuan kedua misi ketiga adalah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui:
 - 1) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek *on-farm* dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu



untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (*off-farm*), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan;

- 2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha /asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi;
 - 3) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "*agriculture estate*", yaitu pendampingan dan pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan potensi lokal kawasan;
 - 4) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta asuransi nelayan;
 - 2) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan;
 - 4) Perbaikan tata niaga perikanan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m³ dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui:



- 1) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - 2) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri melalui standarisasi produk dan inovasi produk;
 - 3) pengembangan inovasi teknologi produksi, agar tingkat efisiensi industri dapat menjadi lebih baik;
 - 4) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25), program standarisasi produk yang dapat meningkatkan nilai tambah produk;
 - 5) pengembangan bahan baku industri substitusi impor melalui pengembangan industri yang menghasilkan produk antara yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri lain;
 - 6) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam rangka mendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan koperasidan UMKM dapat berkembang dan berjalan baik;
 - 7) integrasi antar sektor pendukung urusan industri melalui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*).
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan melalui pengembangan desa ekowisata sebagai upaya menyelaraskan pendekatan ekologi dan ekonomi. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat. Hal ini di implementasikan dengan strategi utamanya sebagai berikut:
- 1) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - 2) Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;



- 3) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
 - 5) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industry pariwisata.
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui:
- 1) Perbaiki sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka;
 - 2) Pengembangan digital *investment promotion*;
 - 3) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmas cakeb, Subosuko wonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmas cakeb, Purwo manggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

Program unggulan daerah yang mendukung pada tujuan kedua misi ke tiga ini yaitu:

- a. Obligasi daerah, merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli Daerah;
- b. Kemudahan akses kredit UMKM merupakan program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan;
- c. Menjaga harga komoditas yaitu program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa;



- d. Asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya;
- e. Melindungi kepentingan nelayan merupakan program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktivitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar;
- f. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara, yang dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah;
- g. Pembangunan embung/irigasi dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri;
- h. Pembukaan kawasan industri baru melalui afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- i. Rintisan pertanian terintegrasi merupakan konsep integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi pertanian, yang dikembangkan antara lain melalui pengembangan *agriculture estate*, integrasi dibawah tegakan, *zero waste*, agrowisata, mina padi, dan pertanian organik.



Gambar 2.5
Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 2



4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.

Tujuan pertama pada misi ini adalah membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Strategi yang akan dilakukan adalah:

- Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; b) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; c) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; d) pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*; e) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; f) peningkatan literasi masyarakat; g) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan tetap



mengarusutamakan gender dan anak, untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan anak di dibidang pendidikan;

- b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif, dengan upaya:
 - 1) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat melalui optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); intervensi pencegahan dan penanganan *stunting*; peningkatan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan dilingkungan masyarakat; dan mendorong pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk penuntasan *Open Defecation Free* (ODF); serta peningkatan peran dan keaktifan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia);
 - 2) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan di 35 Kabupaten/Kota; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan pengembangan teknologi informasi di 7 RSUD/RSJD; peningkatan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan kegiatan bakti sosial dan aksi penanganan cepat termasuk penyediaan RSL apangan dalam rangka mendukung penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 3) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit rujukan khusus daerah, serta pengembangan rumah sakit rujukan kanker; peningkatan sarana prasarana kesehatan dan farmasi; serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
 - 4) Pembudayaan/permasalahan olahraga kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah yang didukung dengan peningkatan prasarana sarana olahraga sekolah.
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) peyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

Program unggulan daerah yang sejalan dengan strategi pencapaian tujuan tersebut yaitu:



- a. Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, antara lain melalui penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB;
- b. Pelatihan tentang gender merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, termasuk kepada pendidik dan anak usia sekolah;
- c. Magang gubernur untuk siswa SMA/SMK merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik;
- d. Pendidikan anti korupsi, juga merupakan salah satu bentuk program sekolah tanpa sekat, yang dilakukan melalui internalisasi kurikulum pemahaman tentang korupsi dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel dengan pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swastadan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan;
- f. Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan



melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa;

- h. Rumah kebudayaan diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah;
- i. Pengembangan infrastruktur olahraga, dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olah raga Jawa Tengah.

Tujuan kedua dalam misi ini adalah mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran pertama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan dengan:

- a. pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan melalui pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai usia dini, dan pengembangan budaya hemat energi dan hemat air;
- b. konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan; peningkatan konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir; rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; serta konservasi energi dan audit energi;
- c. pemulihan kembali lingkungan melalui penanganan limbah industri dan rumah tangga; peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan; serta penegakkan hukum.

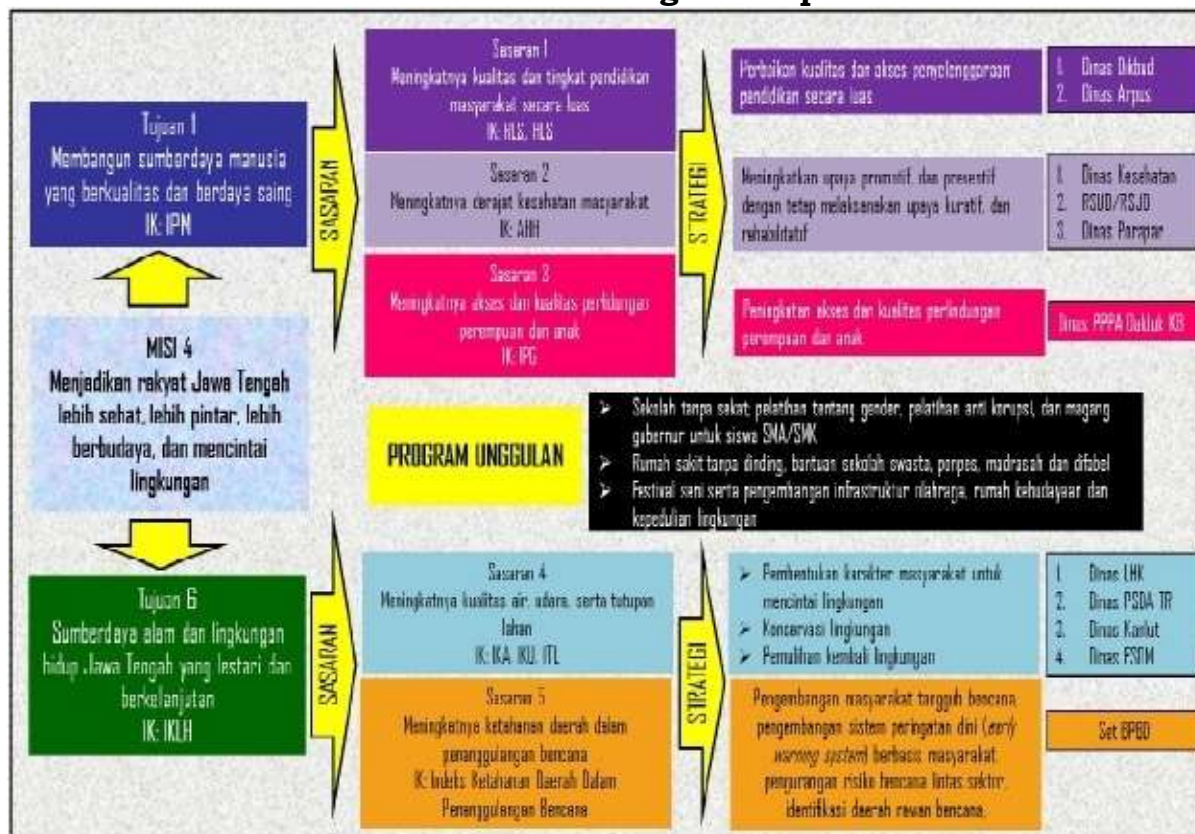
Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, yang dilakukan dengan strategi meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

Program unggulan daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu program kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian



lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan meningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

Gambar 2.6
Skema Strategi Pencapaian Misi 4



E. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 adalah:



Tabel 2.2
Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2019

No	SASARAN STRATGEIS	Jumlah Program Pendukung
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	3
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	32
3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	9
4	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	9
5	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	52
6	Menurunnya pengangguran terbuka	6
7	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	6
8	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	5
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7
10	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	2
11	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	3
12	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	3

F. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrumen SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan RKPD fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan



mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

G. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019, disusun mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Adapun Perjanjian Kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

Government Resources Management System (GRMS)

GRMS adalah system aplikasi terintegrasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sistem aplikasi ini terdiri atas: *system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev* dan *gph*, serta aplikasi networking terdiri atas; *system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude* dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time, sedangkan untuk data kinerja GRMS terintegrasi dengan **e-SAKIP** yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (*E-SAKIP*) yang bertujuan



untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan, komponen dari e-SAKIP Provinsi Jawa Tengah meliputi perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah (RPJMD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan SKPD sampai dengan pejabat struktural eselon IV, Monitoring dan Evaluasi Capaian kinerja per Triwulan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang per tahun sejak tahun 2013. Manfaat dibangunnya e-SAKIP adalah untuk memudahkan dalam pengumpulan data capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah

Gambar 2.6
Pengintegrasian e-SAKIP ke dalam Sistem GRMS





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur



Capaian Indikator Kinerja Utama

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2019

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja



Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **100,36%** atau kategori “**Sangat Baik**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15,38	97,47
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,50	76,99	101,97
3	Angka Kemiskinan	%	10,57-9,57	10,58	99,91
4	Indeks Gini	Angka	0,350	0,358	97,22
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,43	4,49	98,19
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,7	5,41	98,36
7	Inflasi	%	3,5±1	2,81	106,76
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	37,44	39,24	104,81
9	Indeks Williamson	Angka	0,6	0,619	96,77
10	Nilai Tukar Petani	Angka	101,2	104,03	102,80
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,6	71,73	100,18
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,00	92,21	99,95
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,69	66,88	100,28
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					100,36

Sumber : Data Primer diolah 2019

Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, untuk analisis dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019 akan dijelaskan dibawah.



C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2019, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023. Analisis terhadap 12 sasaran strategis dengan 40 (empat puluh) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPJMD 2018-2023.

Sebelum melakukan analisa terhadap sasaran strategis yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 berikut informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dari tahun 2017 s.d 2019.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi IKU 2017-2019

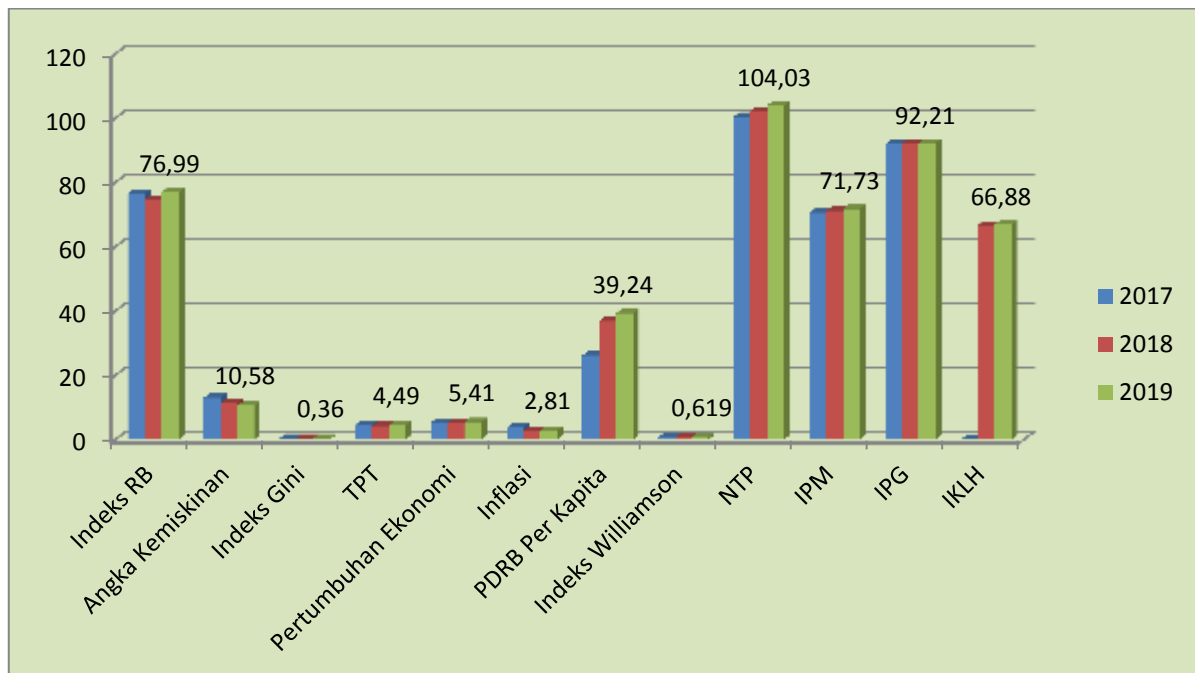
No	IKU	Realisasi		
		2017	2018	2019
1	Persentase penurunan konflik SARA	17,64	7,14	15,38
2	Indeks Reformasi Birokrasi	76,53	76,99	101,97
3	Angka Kemiskinan	13,01	11,32	10,58
4	Indeks Gini	0,36	0,37	0,36
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,57	4,23	4,49
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,32	5,41
7	Inflasi	3,71	2,82	2,81
8	PDRB per kapita	26,14	36,78	39,24
9	Indeks Williamson	0,62	0,633	0,619
10	Nilai Tukar Petani	100,40	102,25	104,03
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,52	71,12	71,73
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,89	92,21	92,21
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	66,59	66,88

Sumber : Laporan Kinerja 2017-2019

Perbandingan capaian indikator kinerja utama tiga tahun terakhir tergambar pada grafik 3.1 dibawah ini:



Grafik 3.1
Perbandingan Rata-rata Realisasi IKU 2017-2019



Berikut ini gambaran mengenai capaian kinerja Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

1. Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Religius, Toleran, dan Guyup.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan memantau setiap perkembangan berbagai konflik di Jateng, termasuk bahaya laten terorisme, radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi lainnya. Saat ini, FKUB membantu penyelesaian izin mendirikan rumah ibadah secara massal. Total ada 1.255 permohonan izin mendirikan rumah ibadah yang sedang diproses secara massal. Terdiri dari 1.155 permohonan izin mendirikan masjid, 78 gereja dan 27 vihara. Jawa Tengah sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk membutuhkan kesadaran akan toleransi dan saling menghargai yang tinggi dalam rangka menjaga keguyuban dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam suku, agama, dan ras tinggal di Jawa Tengah. Sebanyak 74,3 persen merupakan suku Jawa, 5,9 persen suku Madura, 5,6 persen suku Sunda, 5,6 persen suku Batak, dan 4,5 persennya lain-lain. Sikap toleransi dan guyup yang dibangun masyarakat Jawa Tengah selama ini dinilai mampu mengurangi potensi diskriminasi dan konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah. Bahkan tingkat kerukunan antar umat beragama di Jawa Tengah termasuk kategori cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini juga mencerminkan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam

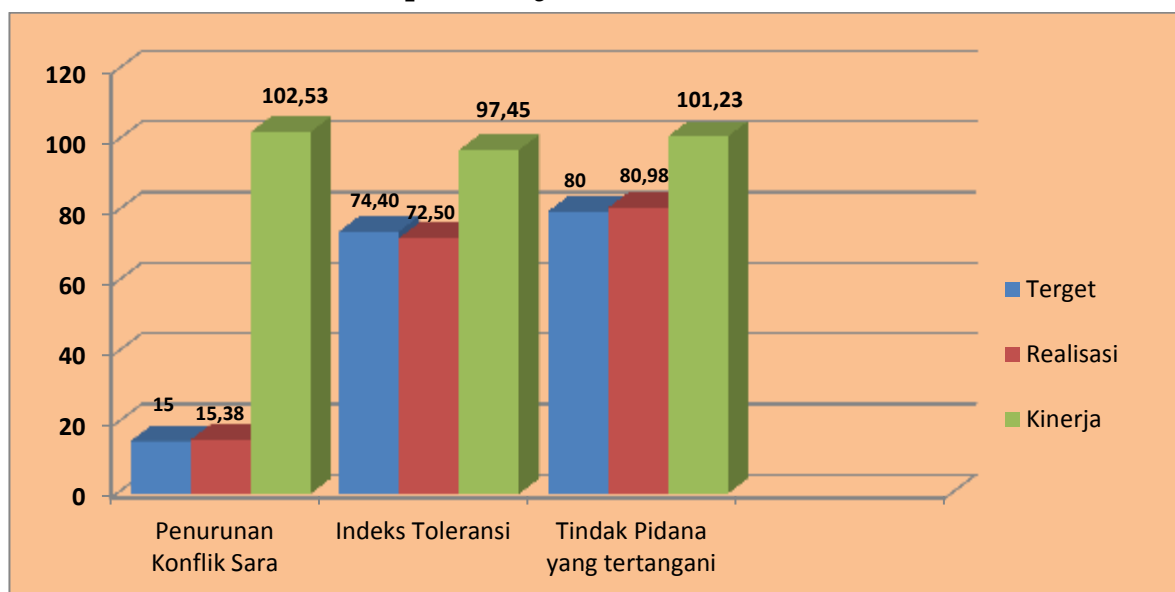


kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang membawa masyarakat Jawa Tengah pada rasa aman dan nyaman.

Dalam rencana pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan, upaya membangun sikap toleransi dan guyup diwujudkan melalui penjabaran misi pertama ini. Tujuan yang diharapkan dari misi ini adalah dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, maupun konflik bernuansa SARA, serta dapat tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik. Berbagai macam praktek toleransi di Jawa Tengah telah dilakukan selama ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kampung Bhinneka juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjaga sikap kebangsaan dan toleransi di masyarakat. Dalam Kampung Bhinneka ini menyajikan berbagai kegiatan seperti dialog kebangsaan, seni budaya, kuliner, serta menampilkan keunikan masing-masing suku di Indonesia. Pemerintah Jawa Tengah juga mendorong pembentukan Forum Perantara (Persaudaraan Antar Etnis Nusantara) yang terdiri dari berbagai suku dan agama di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, kerukunan antarumat, dan pembauran kebangsaan. Selain itu, edukasi kepada siswa di sekolah juga menjadi langkah upaya pemerintah Jawa Tengah untuk membangun sikap toleransi, dan guyup di lingkungan sekolah. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai mengembangkan “sekolah toleransi” dalam rangka membangun kesadaran anak sekolah tentang keberagaman, sikap toleransi, guyup, serta mencegah internalisasi paham radikalisme di sekolah.

Grafik 3.2
Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 1



Sumber : Bakesbangpol Prov Jateng 2019



Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menurunnya konflik sara di Jawa Tengah dengan sasaran terciptanya kohesi sosial masyarakat. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Toleransi dan Persentase Tindak Pidana yang tertangani. Berdasarkan hasil pengukuran untuk target kinerja tujuan tahun 2019 sebesar 15,00% terealisasi sebesar 15,38% atau dengan capaian sebesar 102.53 % dengan kategori **“Sangat Baik”**, Untuk indikator Indeks Toleransi sebesar 72,50 ditahun 2019 dipengaruhi oleh adanya momen pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019 yang memunculkan perilaku saling sindir, dan perdebatan antar masyarakat dan kelompok masyarakat yang berujung pada konflik sosial, politik, maupun konflik bernuansa SARA di masyarakat.

2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*)

Reformasi birokrasi di Jawa Tengah sudah menjadi fokus pembenahan sejak periode RPJMD yang lalu. Dalam *tagline* nya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan keseriusan dalam upaya reformasi birokrasi yaitu “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. *Tagline* ini diperuntukkan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju pada pelayanan publik yang prima, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal, kualitas SDM aparatur yang berkualitas dan berintegritas, serta sistem tata kelola kelembagaan yang efisien.

Menghadapi era digital saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga merespon dengan cepat melalui kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemanfaatan berbagai macam media sosial sebagai media komunikasi dengan publik menjadi salah satu keunggulan pemerintahan Jawa Tengah saat ini. Dengan dibukanya berbagai kanal informasi berbasis teknologi yang mudah diakses mendorong kecepatan respon birokrasi Jawa Tengah atas berbagai masukan, kritik, dan keluhan masyarakat. Pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah secara virtual melalui media sosial dan aplikasi elektronik lainnya menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Jawa Tengah saat ini.

Gubernur Jawa Tengah juga selalu mendorong seluruh aparatur pemerintahan Jawa Tengah untuk mengoptimalkan dunia digital. Koordinasi dengan berbagai level termasuk jejaring hingga tingkat Kabupaten/Kota dalam pelayanan masyarakat, dan juga rapat-rapat dapat digelar secara online. Maka informasi dari masyarakat akan lebih cepat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai aplikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk pengaduan maupun



aplikasi pelayanan publik yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain Lapor Gub, Sakpole, Jateng, Teleapik (Teyeng Ndeleng Pendaftaran Lan Poliklinik), dan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pemerintahan secara internal dan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, telah dikembangkan dan dimanfaatkan berbagai aplikasi pemerintahan (*e-government*) antara lain *Government Resources Management System* (GRMS) yang berisi bermacam aplikasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengendalian dan evaluasi secara terintegrasi. Serta dikembangkan aplikasi *e-office* untuk mendukung pengelolaan administrasi perkantoran menuju *paperless*, penerapan tanda tangan secara elektronik (TTE), dan lainnya.

Dalam upaya perwujudan pengawasan dan integritas ASN juga dilakukan berbagai macam kegiatan antara lain pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong pembentukan Zona Integritas di tiap-tiap perangkat daerah, internalisasi kurikulum integritas dalam pendidikan dan pelatihan aparatur, penguatan kapasitas APIP, dan sebagainya, berkaitan dengan pendorongan reformasi birokrasi di kabupaten/kota sebagaimana dicita-citakan dalam misi kedua RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, secara rutin pemerintah provinsi melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik dan bersih. Pemerintah provinsi juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk perbaikan penyelenggaraan manajemen pemerintahan menuju efektif, efisien dan akuntabel, serta optimal dalam pelayanan publik secara terbuka, cepat, dan responsif.

Upaya pencapaian kinerja tujuan organisasi “Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN” tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan hasil dari tahun sebelumnya, dengan peningkatan nilai sistem merit dari 267,5 menjadi 280.

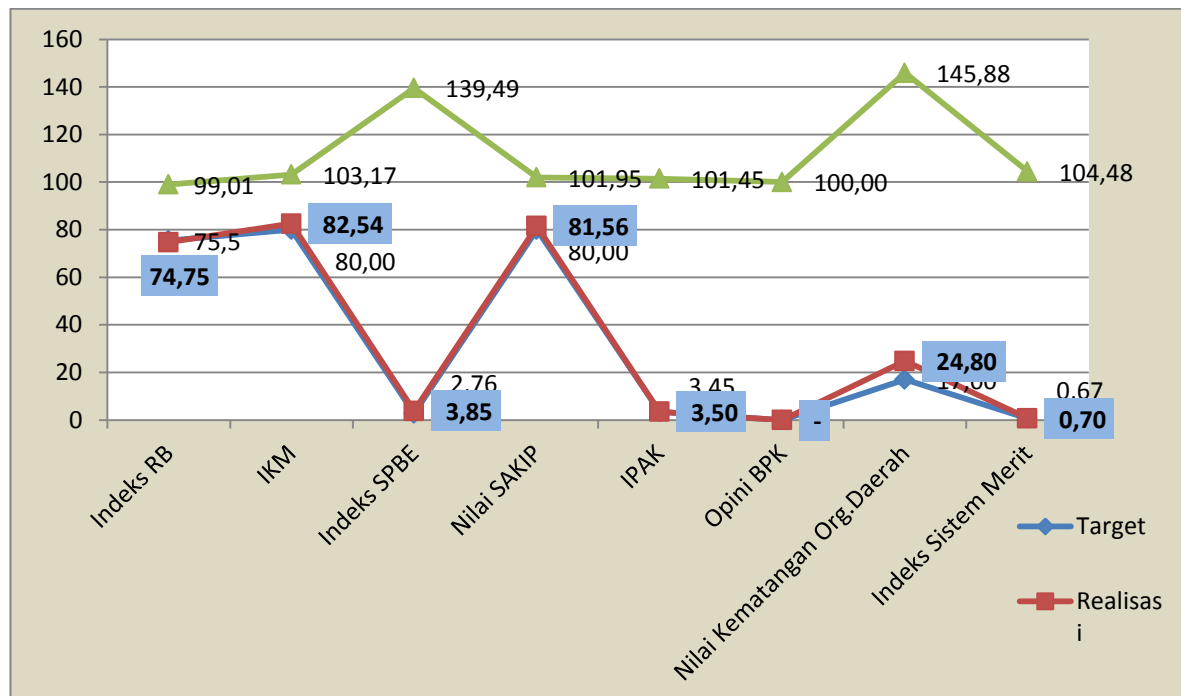
Perbaikan yang dilakukan antara lain: pengembangan *assesment centre* dan pemetaan kompetensi, pengembangan dan *integrasi e-performance*, penempatan pegawai baru sesuai dengan jabatan yang dilamar, pengembangan sistem informasi mempermudah pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pensiun, BPJS, cuti dll.

Provinsi Jawa Tengah oleh KASN ditetapkan masuk dalam kategori III (Baik) karena sudah memenuhi sebagian besar kriteria sistem merit dalam manajemen ASN, dan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian JPT melalui *talent pool* untuk jabatan tertentu apabila *talent pool* dan rencana suksesinya sudah diperbaiki serta tetap dengan pengawasan oleh KASN.



Berikut digambarkan pencapaian kinerja misi kedua dalam RPJMD yang berkaitan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota di tahun 2019. Dari delapan indikator kinerja pada misi ke-2 ini di tahun 2019 seluruhnya dinilai tingkat ketercapaiannya sangat tinggi.

Grafik 3.3
Capaian Tujuan dan Sasaran Misi 2



Sumber : Bappeda Prov. Jateng 2019

Tujuan ini diukur ketercapaiannya dengan Indeks Reformasi Birokrasi, dengan tiga sasaran antara lain meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari target sebesar 75,5 untuk tahun 2019 terealisasi sebesar 74,75 atau tingkat capaian sebesar 99,01% dengan kategori **“Baik”**, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai sebesar 93,44%, hal tersebut artinya Penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan sangat baik. Keberhasilan penerapan reformasi birokrasi ini bisa menjadi *role model* daerah lain di Indonesia.

3. Kemiskinan di Jawa Tengah Yang Semakin Menurun Secara Merata

Tujuan ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator tujuan yaitu Angka Kemiskinan dan Indeks Gini, capaian dua indikator tujuan rata-rata tercapai sebesar 98,57% atau kategori **“Baik”** bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai sebesar 77,27% sedangkan dibanding realisasi nasional rata-rata sebesar 4,90 artinya Jawa Tengah diatas capaian Nasional. dan dua Sasaran Meningkatnya kualitas hidup



penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan dan kelompok rumah tangga desil terbawah serta menurunnya pengangguran terbuka.

Berdasarkan data tersebut, bahwa Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diyakini bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menjadi satu digit atau di bawah 10 persen pada 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 15 Januari 2020, data per September 2019 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 10,58 persen dengan jumlah penduduk miskin 3,68 juta orang. Angka itu menurun dari posisi per September 2018 sebesar 11,32 persen dengan jumlah penduduk miskin 3,87 juta orang. Namun, persentase itu masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,22 persen per September 2019.

Angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun seiring dengan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas infrastruktur. Oleh karena itu, diperkirakan tingkat kemiskinan Jateng per Maret 2020 akan turun di bawah 10 persen. Ada kemungkinan target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekan angka kemiskinan satu digit terealisasi pada tahun ini, untuk semakin menekan angka kemiskinan, para pemangku kepentingan perlu berfokus dalam pengembangan infrastruktur di zona merah. Infrastruktur tersebut mencakup konektivitas yang menghubungkan antar desa dan titik-titik yang masih terisolasi.

Wilayah kabupaten dengan zona merah atau angka kemiskinan tertinggi ialah Brebes, Banyumas, Kebumen, Pemalang, dan Cilacap. Padahal, daerah-daerah itu memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi pertumbuhannya kurang berkualitas., akibatnya, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang ditunjukkan dengan indeks gini rasio, masih tinggi. Per Maret 2019, gini rasio di Jateng mencapai 0,361, meningkat 0,004 poin dari September 2018 sebesar 0,37, Semakin tinggi gini rasio, semakin tinggi juga ketimpangan ekonomi. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah menuntaskan kemiskinan.

Pengurangan kemiskinan akan semakin cepat jika wilayah zona merah mengoptimalkan potensi perekonomiannya. Misalnya, di Brebes akan dibangun Kawasan Industri (KI), sebagai salah satu prioritas pengembangan Pemerintah Jateng, selain itu, karena wilayah Brebes, Cilacap, dan Banyumas cenderung berdekatan dengan Jawa Barat, Pemprov Jateng dapat berkoordinasi dengan Pemprov Jabar perihal peluang kolaborasi bisnis dan pembangunan, mengentaskan kemiskinan erat kaitannya dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi Jateng, yang ditargetkan mencapai tujuh persen pada tahun 2023. Kemiskinan yang menurun akan berdampak terhadap kondisi sosial yang kondusif, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan optimal, pemerintah harus



melihat pertumbuhan tujuh persen yang berkualitas. Artinya pertumbuhan itu berdampak positif terhadap sosial dan memerhatikan lingkungan.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis bahwa penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tertinggi di seluruh Indonesia. Catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret-September 2019 turun dari 3,74 juta menjadi 3,68 juta orang. Dengan demikian, sebanyak 63.830 penduduk miskin Jawa Tengah berhasil lepas dari garis kemiskinan pada periode tersebut, peringkat kedua penurunan angka kemiskinan diraih Provinsi Jawa Timur (56.250 jiwa). Adapun Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa) menyusul di peringkat ketiga nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 50 persen dalam proses pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. “Kita tahu kebanyakan pelaku UMKM adalah perempuan. Sehingga dia bisa menjadi penopang penghasilan suaminya. Yang bekerja di dalam rumah tangga juga untuk menjaga ketika suaminya punya pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap, seiring dengan laju pengentasan kemiskinan, jumlah UMKM binaan di Jateng dan omzetnya juga meningkat cukup tinggi. Peningkatan omzet itu membawa pengaruh yang besar untuk pengentasan kemiskinan. Jumlah UMKM sudah melebihi 13 ribu UMKM, dan omzetnya sekarang tinggi 50 persen kontribusi pengentasan kemiskinan ditopang dari UMKM.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,358. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,361. Apabila dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 Gini Ratio di Jateng naik 0,001 yang sebesar 0,358, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,379 menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,383, namun meningkat jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,377. Adapun Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,315, menurun jika dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,318 namun stagnan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018.

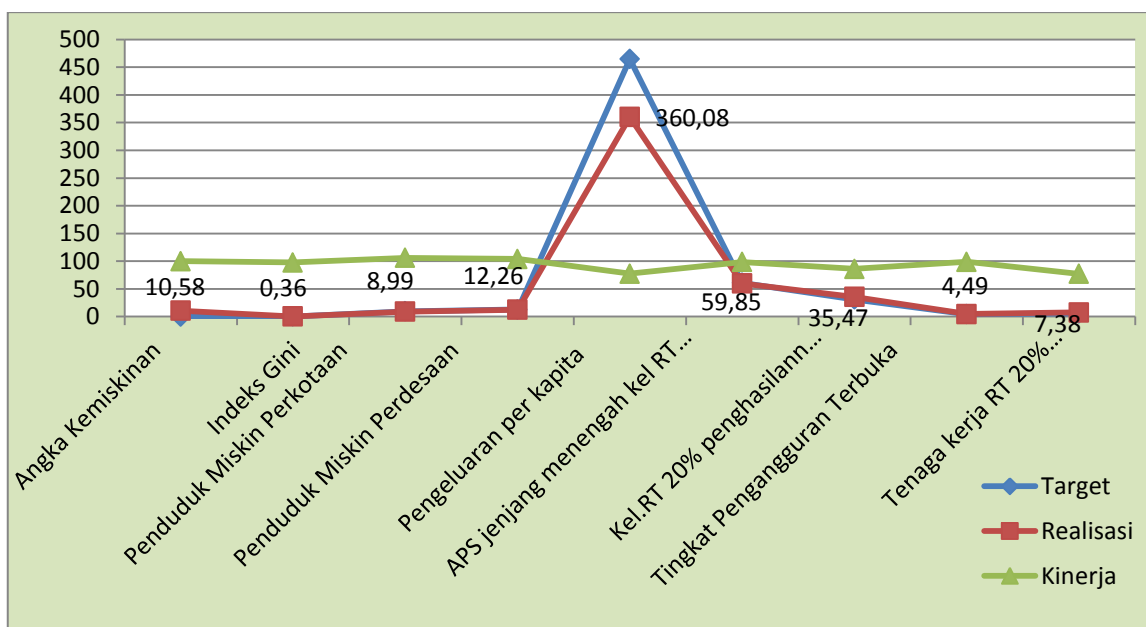
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah mencapai sebesar 18,61 persen, hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,49 persen yang juga tergolong pada kategori ketimpangan rendah, untuk daerah



perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,36 persen yang berani juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Berikut gambaran pencapaian kinerja misi ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan Kemiskinan di Jawa Tengah Yang Semakin Menurun Secara Merata.

Grafik 3.4
Capaian Tujuan 1 dan Sasaran Misi 3



Sumber : Bappeda Prov.Jateng 2019

4. Menciptakan Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, Menyebar dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan

Tujuan ini diukur ketercapaiannya melalui empat indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB Per Kapita dan Indek Williamson serta satu Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah, realisasi indikator tujuan rata-rata tercapai sebesar 101,76% dengan kategori **“Sangat Baik”** bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai sebesar 94,69%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi ini tumbuh 5,66 persen pada triwulan III-2019, jika dibanding triwulan III-2018, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,66 persen, fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu hal yang mempengaruhi ekonomi Jawa Tengah. Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua negara tujuan utama ekspor Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah selama triwulan III-2019 tercatat mencapai Rp351.479 miliar, dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh ekspansi di hampir semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyedia akomodasi dan makanan minuman yang mencapai 18,84



persen, sementara itu jika dibanding triwulan II-2019, terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,44 persen.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2019, masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan yang memberi kontribusi 33,88 persen, dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang mencapai 59,09 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat Jateng mengalami inflasi sebesar 0,45 persen selama Desember 2019, Inflasi sebesar 0,45 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 136,71, kenaikan harga sejumlah bahan pangan, seperti bawang merah, cabai merah telah menjadi pemicu inflasi. Selain itu, kenaikan harga tiket pesawat terbang juga memicu terjadinya inflasi. BPS juga mencatat enam daerah yang menjadi titik survei biaya hidup di Jawa Tengah juga mengalami inflasi. Inflasi tertinggi, terjadi di Purwokerto yang mencapai 0,51 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kudus sebesar 0,24 persen, tarif air minum PAM menjadi satu dari 10 sektor yang menyumbang inflasi di Provinsi Jateng pada 2019.

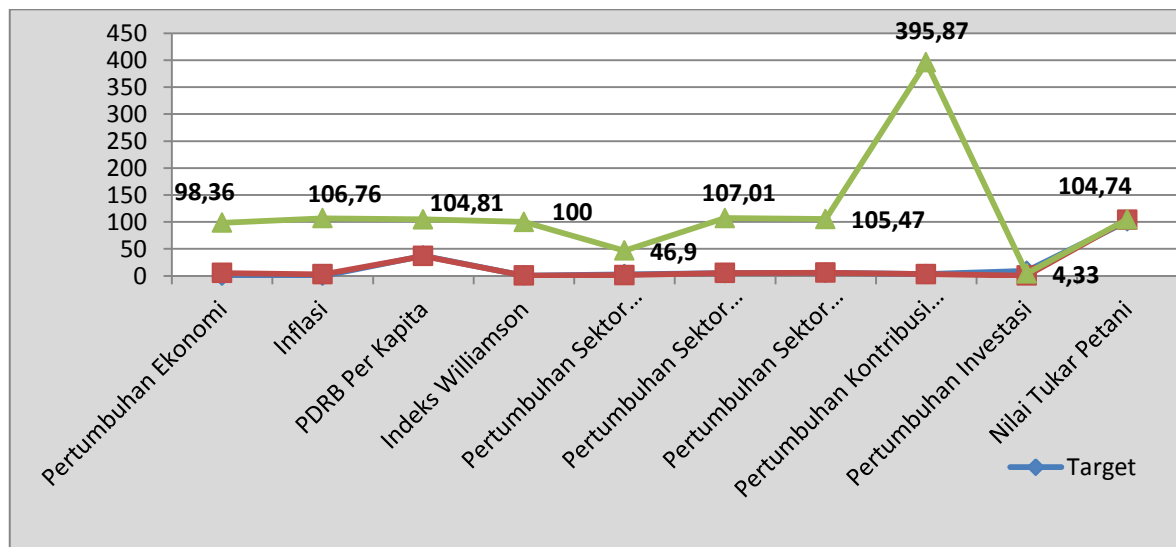
Inflasi yang disumbang dari tarif air minum bagian dari *administration prize* dari perusahaan air minum. Kemungkinan inflasi dipengaruhi dari sisi kebutuhan air minum, atau dari sisi inputnya dan kenaikan tarif, inflasi dari tarif air minum PAM wajib diwaspadai, dan dikendalikan untuk 2020. Artinya, kenaikan tarif air minum yang sudah diterapkan, harusnya ditunda pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Adapun kenaikan tarif air minum PAM sudah diterapkan di beberapa daerah, termasuk Kota Semarang sejak Agustus 2019. Kenaikan tarif tersebut didasari Perwali No 31 Tahun 2019, di mana kenaikan tarif air minum PAM di Kota Semarang mencapai 16 sampai 52 persen, di sisi lain, akibat tersendatnya pasokan air di Kota Semarang ganggu laju perekonomian bisnis mikro, pelaku usaha mikro di wilayah Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, keluhan tersendatnya pasokan air bersih dari PDAM, sejumlah pelaku usaha, tak lancarnya distribusi air, sehingga, tak jarang beberapa pelaku usaha membeli air bersih ke sejumlah depot air minum untuk mencukupi kebutuhan air usahanya.

Menurut BPS Jateng, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita provinsi ini selama 2018 lalu adalah Rp 36,78 juta, rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah itu mengalami peningkatan dibanding 2017 yang hanya Rp 34,22 juta. pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2018 tercatat mencapai 5,32% atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5,26%. "Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonominya, industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi.



Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi. Adapun jika dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah. "Konsumsi rumah tangga mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah.

Grafik 3.5
Capaian Tujuan 2 dan Sasaran Misi 3



Sumber : Bappeda Prov.Jateng 2019

Dari 19 indikator kinerja yang ada dalam misi ketiga ini, di tahun 2019 sebanyak 14 indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, tiga indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian tinggi, dan dua indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat rendah. Dua indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat rendah adalah pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertumbuhan investasi. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tidak tinggi meskipun tumbuh positif lebih besar dipengaruhi oleh sub sektor pertanian dan kehutanan. Faktor cuaca dimana di tahun 2019 terjadi kemarau panjang cukup memberikan dampak pada produksi pertanian dan perkebunan, bahkan banyak yang mengalami puso. Sedangkan sub sektor kehutanan lebih banyak dipengaruhi faktor produksi kayu yang berasal dari Perum Perhutani mengalami penurunan cukup drastis karena permintaan pasar yang juga menurun, serta mulai bergesernya pemanfaatan ekonomi dari kawasan hutan sebagai sumber produksi kayu menjadi pariwisata dan jasa lingkungan, yang dalam perhitungan PDRB tidak termasuk dalam variabel perhitungan sumber PDRB sub sektor kehutanan. Sementara pertumbuhan investasi mencapai 0,39% yang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung melambat dan kurang menguntungkan bagi investor; menurunnya realisasi investasi PMDN karena adanya beberapa investor yang



membatalkan rencana investasinya karena menunggu kepastian implementasi beberapa kebijakan pemerintah di bidang investasi; adanya kesulitan investor dalam mencari lahan sesuai peruntukan karena belum semua kabupaten/kota mempunyai Perda RTRW.

5. **Sumberdaya Manusia Jawa Tengah Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing**

Tujuan ini diukur ketercapaiannya melalui dua indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tiga Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Akses dan Kualitas, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender, realisasi indikator tujuan tercapai sebesar 71,12 atau 93,68% dengan kategori **“Baik”** dari target yang ditetapkan sebesar 7,60 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai sebesar 97,42, sedangkan dibanding realisasi nasional rata-rata sebesar 71,39 artinya Jawa Tengah diatas capaian Nasional.

Berdasarkan data tersebut, maka analisa yang dapat disampaikan bahwa Pembangunan Manusia Jawa Tengah Terus Menunjukkan Perbaikan, ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis BPS Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Februari 2020, mengalami tren kenaikan sejak tahun 2010. IPM Jawa Tengah pada tahun 2019 berada di posisi 71,73 dari skala 0 – 100, level tersebut naik 0.61 point atau (0,86%) dari posisi 2018. Indeks semakin tinggi menunjukkan perbaikan pembangunan manusia, sebaliknya semakin rendah mengindikasikan penurunan. IPM di atas 70 mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Jawa Tengah masuk kategori tinggi. Perbaikan pembangunan manusia Jawa Tengah terlihat dari beberapa indikator, yaitu bayi yang baru lahir pada 2018 memiliki harapan hidup hingga 74,18 tahun, lebih lama 0,10 tahun dari tahun sebelumnya, kemudian, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada 2018 memiliki harapan untuk dapat menikmati pendidikan selama 12,63 tahun (sampai jenjang D I), atau lebih lama 0,06 tahun dari tahun 2017, penduduk usia 25 tahun rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,35 tahun (sampai kelas VIII), lebih lama 0.08 tahun dari tahun sebelumnya, serta pengeluaran per kapita masyarakat Jawa Tengah meningkat Rp 400 rb dibandingkan tahun 2017, menjadi Rp 10,777 juta/tahun, semua indikator pembentukan IPM menunjukkan peningkatan. Upaya-upaya perbaikan pembangunan manusia terus ditingkatkan.

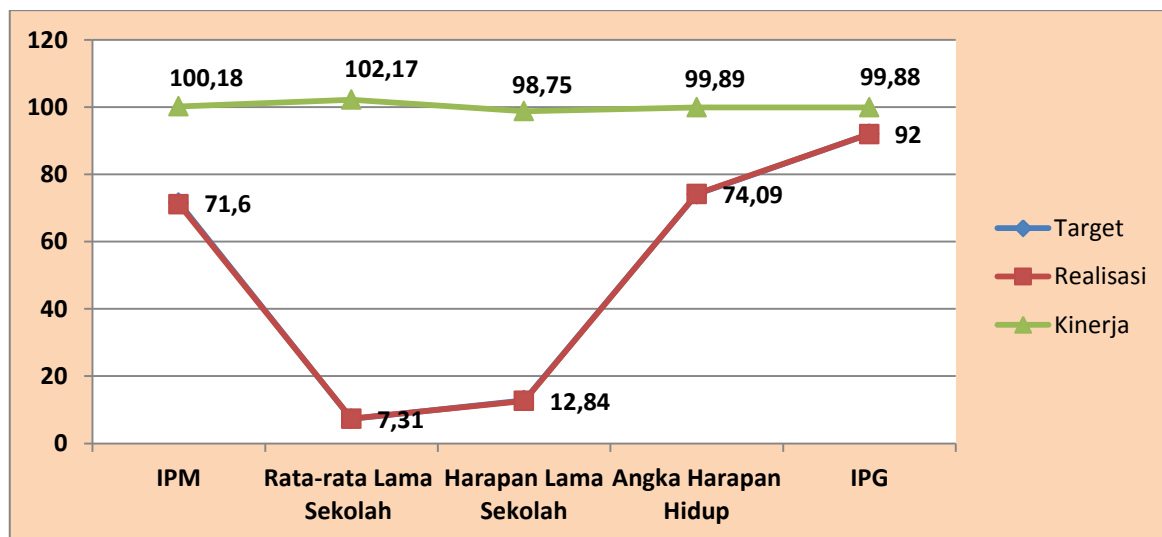
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jateng pada 2018 naik 0,6 poin menjadi 71,12 lebih tinggi dibandingkan 2017 yakni 70,52, semenjak tahun 2017, status pembangunan manusia di Jawa Tengah sudah mulai terkategori “tinggi”



(IPM di atas 70), sementara antara tahun 2010-2016, masih terkategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Selama periode 2017 - 2018, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 74,18 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2017. Kendati demikian, pada 2018 IPM Jawa Tengah masih berada di bawah level nasional yang besarnya 71,39. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, IPM Jawa Tengah hanya lebih unggul dibandingkan Jawa Timur yang pada tahun 2018 memiliki IPM 70,77. IPM tertinggi di Pulau Jawa masih ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 80,47. Sejak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta telah berubah dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”, posisi selanjutnya, DI Yogyakarta dengan IPM sebesar 79,53, disusul oleh Banten dengan IPM sebesar 71,95, Jawa Barat dengan IPM sebesar 71,30 dan kemudian Jawa Tengah di posisi kelima sebesar 71,12.

Harapan lama sekolah telah mencapai 12,68 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia tujuh tahun di Jawa Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D-I, meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah 7,53 tahun yang berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas 1), meningkat 0,18 tahun dibandingkan tahun 2018. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 10,78 juta rupiah pada tahun 2018, meningkat Rp 400.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.6
Capaian Tujuan 1 dan Sasaran Misi 4



Sumber : Bappeda Prov.Jateng 2019



6. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Yang Lestari dan Berkelanjutan

Tujuan ini diukur ketercapaiannya melalui indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan dua Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan dan meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Realisasi indikator tujuan tercapai sebesar 66,88 atau 100,28% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 67,26 sudah tercapai sebesar 99,44%, sedangkan dibanding realisasi nasional rata-rata sebesar 65,14 artinya Jawa Tengah diatas capaian Nasional.

Berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan bahwa jika dilihat lebih detail, kondisi kualitas udara masih sangat baik dengan enam provinsi yang mengalami peningkatan kualitas udara, yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Selatan. Meski begitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah perlu diwaspadai dalam pencemaran udara di daerah perkotaan. Ini utamanya karena masalah polusi dari transportasi.

Mengenai kondisi kualitas air sungai dan danau secara nasional, secara umum masih kurang baik. Sejumlah 16 provinsi mengalami kecenderungan penurunan indeks kualitas sungai, namun terdapat perbaikan di Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Maluku. Ini utamanya karena persoalan limbah domestik. Untuk limbah industri kita bisa paksa perusahaan untuk jalankan aturan. Untuk domestik kita terus bangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Adapun kondisi tutupan lahan secara nasional berada dalam kecenderungan yang stabil. Namun delapan provinsi berada dalam kondisi waspada karena luas tutupan lahannya sedikit yaitu: Sumatra Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten dan Bali. Hal ini karena hutan atau taman kota masih belum memadai di wilayah-wilayah tersebut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Tengah diklaim cukup baik oleh sebagian pihak, namun kualitas air masih tergolong rendah. Indeks tersebut menggambarkan kondisi lingkungan hidup yang dapat dijadikan evaluasi secara umum terhadap kualitas lingkungan hidup.

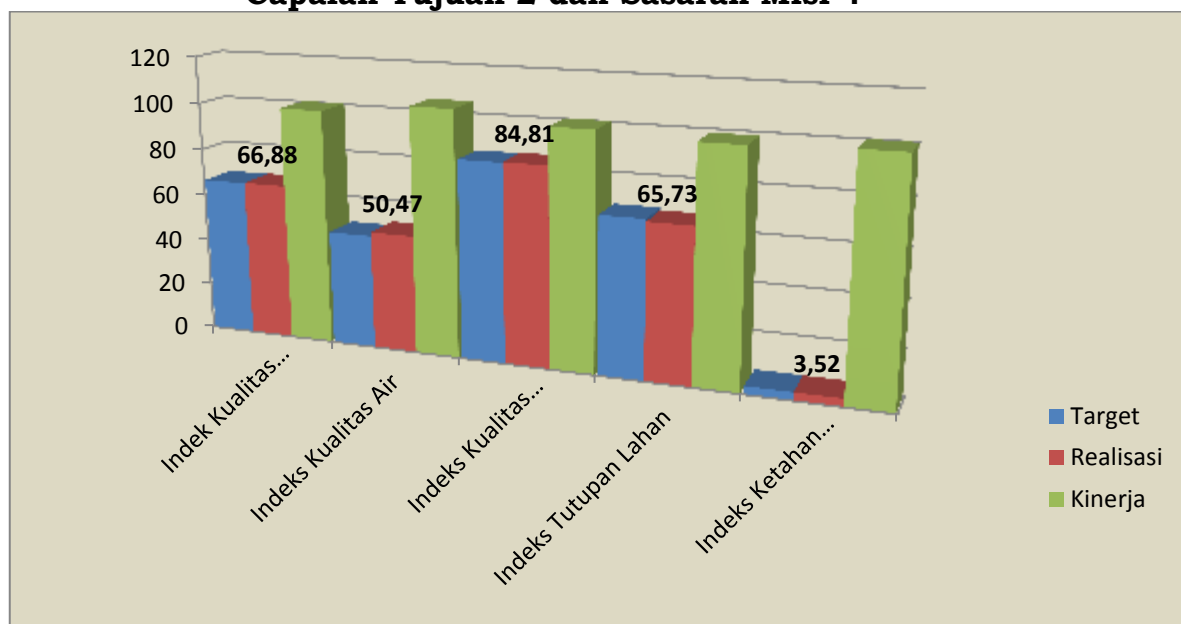
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, IKLH 2018 di Jawa Tengah sebesar 66,59 dari skor 100. Indikatornya meliputi penilaian atas kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Rinciannya kualitas udara sebesar 82,97, kualitas air 51,34, dan kualitas tutupan lahan 65,74. Dari angka tersebut, kualitas air di Jawa Tengah masih paling rendah. Aktivis lingkungan Jawa Tengah Arief Khristanto menyatakan bahwa secara umum angka tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari Pemerintah



Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pengelolaan lingkungan. Untuk kualitas udara, yang dinilai hanya dua jenis dari lima jenis pencemar udara yang penting. Hanya dinilai SO₂ dan NO₂ sementara PM, HC dan CO₂ belum diukur. Sedangkan untuk kualitas air, belum diperhitungkan tingkat cemaran logam berat yang dimungkinkan dihasilkan dari pertumbuhan industri, sebagaimana dirumuskan dalam isu strategis pada dokumen tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Daerahnya masih memiliki tingkat IKLH rendah, untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Daerah dan seluruh pihak perlu bersinergi dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan agar pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 dapat tercapai.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 66,88, indeks kualitas lingkungan hidup tersebut lebih tinggi dari target capaian nasional, ini menandakan kualitas hidup di Provinsi Jawa Tengah bagus, dilihat dari indikator yang ada rata-rata lebih dari 100%, program inovasi yang dilaksanakan juga berpengaruh langsung terhadap indikator ini secara langsung sehingga target ini tercapai.

Grafik 3.7
Capaian Tujuan 2 dan Sasaran Misi 4



Sumber : Dinas Lingkungn Hidup dan Kehutanan Prov.Jateng 2019

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari enam tujuan strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, sasaran strategis ini diarahkan untuk memenuhi target indikator kinerja utama, sebagai berikut :



2.1 Sasaran Strategis 1.1.1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Real	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Toleransi	Persen	74,40	72,50	97,45	76,60	94,65
2	Persentase Tindak Pidana Yang Tertangani	Persen	80,00	80,98	101,23	90,00	89,98
Rata-rata capaian Sasaran Strategis 1.1.1					99,34		94,65

Berdasarkan Tabel 3.4 Sasaran Strategis 1.1.1 Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 99,34 % atau kategori “**Baik**”. Untuk toleransi kehidupan beragama di Jawa Tengah apabila dibandingkan capaian nasional 72,37 lebih tinggi 0,13 poin atau 0,18%, tetapi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 94,65%. Meskipun demikian kerukunan umat beragama atau kondisi kehidupan umat beragama di Jawa Tengah yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing masih perlu ditingkatkan. Untuk Indikator tindak pidana yang tertangani sudah tercapai sebesar 101,23%, tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terjadi perbedaan indikator, namun bila dibandingkan target akhir RPJMD baru tercapai sebesar 89,98% artinya masih perlu penanganan yang serius serta sinergitas dengan lembaga terkait agar penanganan tindak pidana di Jawa Tengah berjalan lebih optimal.

Tantangan dalam mewujudkan terciptanya kohesi sosial masyarakat adalah:

- 1). Keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di wilayah Jawa Tengah.
- 2). Permasalahan SARA dapat dipicu oleh intensitas pelaksanaan agenda politik/pesta demokrasi yang semakin tinggi.
- 3). Paham radikal dan terorisme yang masih belum bisa dihilangkan sepenuhnya dari lingkungan masyarakat Jawa Tengah.
- 4). Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang masih perlu ditingkatkan.



- 5). Permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat Jawa Tengah.
- 6). Masih adanya keterbatasan sumberdaya dalam penanganan dan mediasi konflik bermuatan SARA serta penegakan hukum.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 1.1.1 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 68.019.063.000 dan terealisasi sebesar Rp 64.629.029.580, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 3.390.033.420 atau 4,98%, dan dilaksanakan dengan program :

- 1) Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan.
- 2) Program Penguatan Ketahanan Bangsa.
- 3) Program Penguatan Politik Dalam Negeri.
- 4) Program Peningkatan Aparatur.
- 5) Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 6) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 7) Program Pelayanan Umum Keprotokolan dan Kehumasan

2.2. Sasaran Strategis 2.1.1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00	82,54	103,18	88,00	93,80
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)	Angka	2,76	3,85	139,49	3,24	118,83
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2.1.1					121,34		106,32

Berdasarkan Tabel 3.5 Sasaran Strategis 2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 121,34 % atau kategori **“Sangat Baik”**. Dari dua indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah sudah semakin baik dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 106,32%. Apabila



dibandingkan dengan capaian nasional 2,18 lebih tinggi 1,67 %. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Sangat Baik pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019. Meskipun demikian tetap perlu ditingkatkan agar pelayanan publik lebih optimal. untuk indikator Indek Kepuasan masyarakat tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan realisasi nasional karena survei IKM secara parsial. Sedangkan untuk indeks SPBE, guna menjawab tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, Pemerintah terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik saat ini tengah menyiapkan sebuah portal data pemerintahan sejenis Google, yang memuat seluruh data Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan bisa diakses oleh instansi pemerintah sendiri maupun publik.

Untuk mencapai kinerja Sasaran 2.1.1 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.534.714.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.503.210.370, terdapat efisiensi sebesar Rp 31.503.630.000 atau 0,69%, dan dilaksanakan dengan program Program pengembangan e-government.

2.3. Sasaran Strategis 2.1.2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2

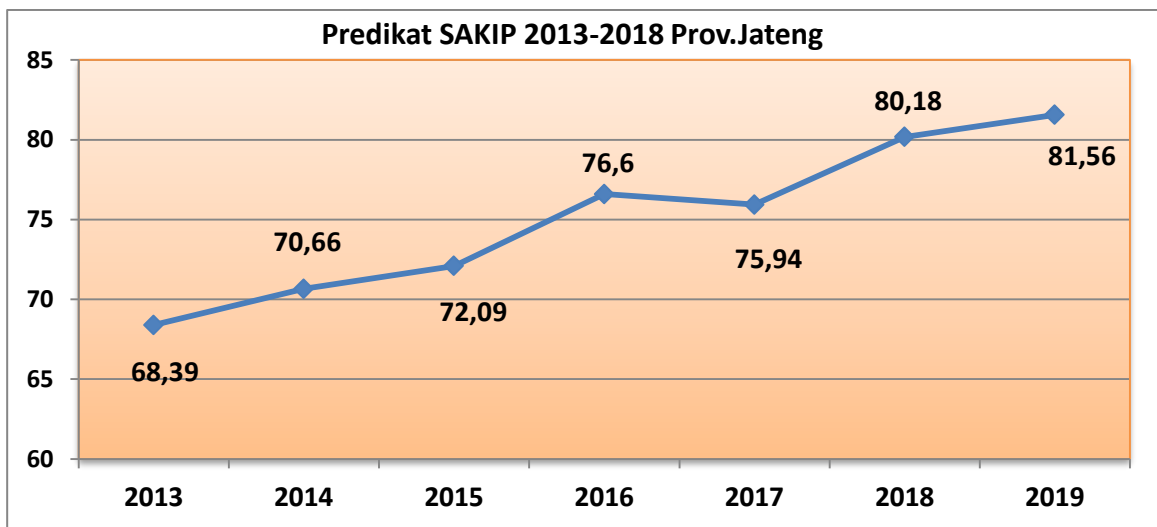
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP	Angka	80,00	81,56	101,95	85,00	95,95
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,45	3,50	101,45	3,50	100,00
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2.1.2					101,13		98,65

Berdasarkan Tabel 3.6 Sasaran Strategis 2.1.2 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan, dari 3 (tiga) Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 101,13 % atau kategori **“Sangat Baik”**. Artinya bahwa Manajemen Pemerintahan di Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Jika dibandingkan dengan target



akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 98,65%, perbandingan capaian kinerja untuk indikator Nilai SAKIP sejak lima tahun terakhir sebagaimana grafik 3.8 dibawah ini :

Grafik 3.8

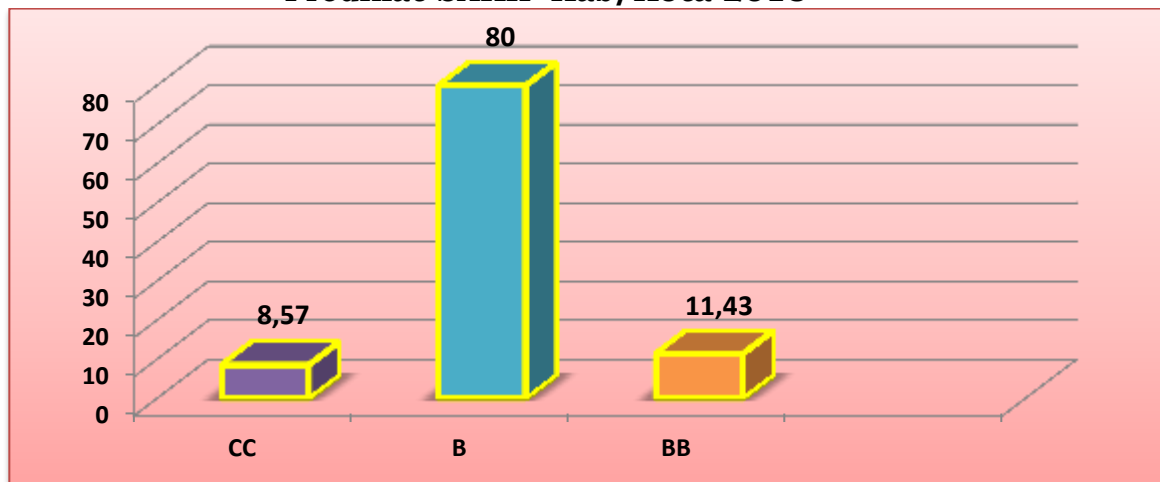


Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Kemenpan RB

Kondisi pelaksanaan SAKIP Kabupaten /Kota di Jawa Tengah berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 oleh Kementerian PAN RB sebagaimana Grafik 3.9 dibawah ini :

Grafik 3.9

Predikat SAKIP Kab/Kota 2018



Sumber : Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 Kemenpan RB

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 2.1.2 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 925.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 875.158.659,- terdapat efisiensi sebesar Rp 49.841341,- atau 5,39%, dan dilaksanakan dengan program :

- 1) Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
- 2) Program Pengelolaan Aset Daerah
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Pembangunan Budaya Integritas



- 5) Program Peningkatan Manajemen Mutu
- 6) Program Manajemen Resiko
- 7) Program Pengawasan Internal Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat.

2.4. Sasaran Strategis 2.1.3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Baik***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	17,00	24,78	145,76	29,00	85,45
2	Indeks Sistem Merit	Angka	0,67	0,70	104,48	0,71	98,59
Persentase Capaian Sasaran Strategis 2.1.3					125,12		92,02

Berdasarkan Tabel 3.7 Sasaran Strategis 2.1.3 Meningkatkan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Baik, dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 125,12 % atau kategori **“Sangat Baik”**. Artinya Kelembagaan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan kebutuhan daerah baik dari aspek struktur maupun dari aspek Sumber Daya Aparaturnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 92,02%, artinya untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah masih tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran.

Untuk indikator kinerja indek sistem merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ditetapkan masuk dalam kategori III (Baik), karena sudah memenuhi sebagian besar kriteria sistem merit dalam manajemen ASN, dan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian JPT melalui *talent pool* untuk jabatan tertentu. Apabila *talent pool* dan rencana suksesinya sudah diperbaiki serta tetap dengan pengawasan KASN.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 2.1.3 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran Rp 6.951.250.000,-



dan terealisasi sebesar Rp 6.539.,617.181,-, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 411.632.819,-atau 5,92%. Untuk Kematangan Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp 775.000.000,- realisasi Rp 760.693.980,- sisa Rp 14.306.020 atau efisiensi sebesar 1,85%, dan dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah.

2.5. Sasaran Strategis 3.1.1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin Terutama Penduduk Miskin Pedesaan, dan Kelompok Rumah Tangga Desil Terbawah***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd Trgt Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	%	9,54	8,99	106,12	9,17	102,00
2	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	%	12,74	12,26	103,92	11,97	97,63
3	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	464,81	360,08	77,47	523,15	68,83
4	Angka Partisipasi Sekolah jenjang Menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,85	59,65	98,03	61,75	96,60
5	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,75	35,47	86,69	29,75	83,87
Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.1.1					94,45		89,79

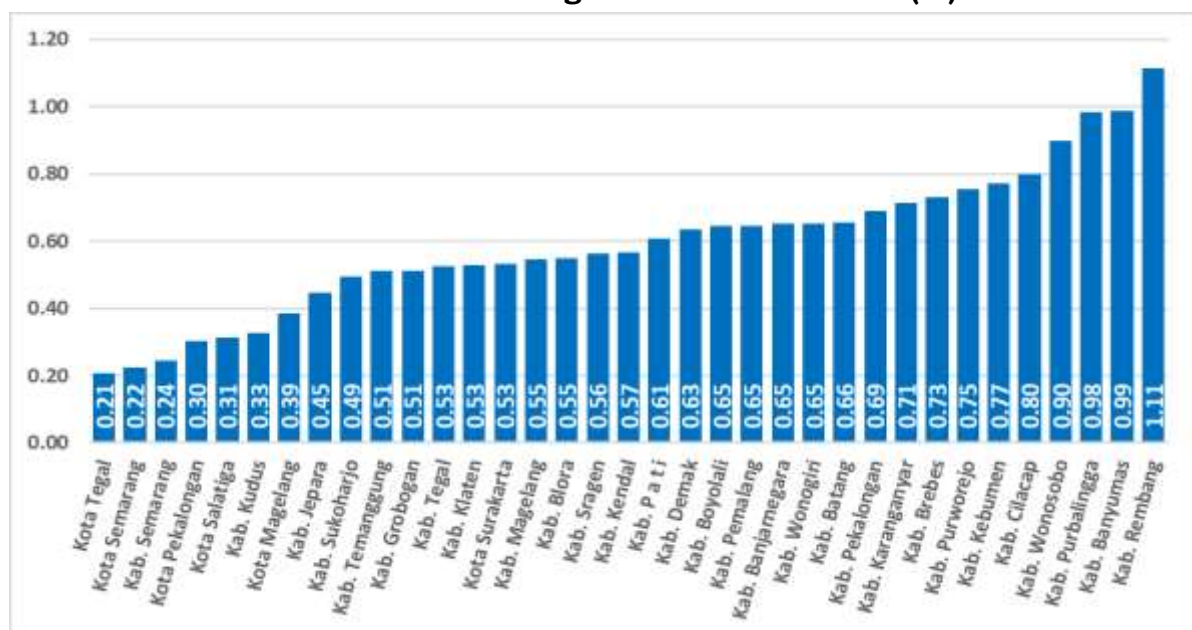


Berdasarkan Tabel 3.8 Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin Terutama Penduduk Miskin Pedesaan, dan Kelompok Rumah Tangga Desil Terbawah, dengan lima Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 94,45% atau kategori “**Baik**”. Artinya bahwa Penduduk Miskin Terutama Penduduk Miskin Pedesaan, dan Kelompok Rumah Tangga Desil Terbawah di Jawa Tengah sudah semakin berkualitas, tetapi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata baru tercapai 89,79%, artinya untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah masih tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai upaya menurunkan angka kemiskinan diantaranya Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan pendampingan Desa Miskin. Rata-rata penurunan kemiskinan di Kab/Kota sebagaimana Grafik 3.9 dibawah ini

Grafik 3.9

Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 3.1.1 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 997.789.147.000,- dengan realisasi sebesar Rp 949.295.601.120,- sisa sebesar Rp 48.493.545.880,- atau 4,86%. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan dengan program :

- 1) Program Rehabilitasi Sosial
- 2) Program Penanganan Fakir Miskin
- 3) Program Perlindungan dan jaminan sosial



- 4) Program Pemberdayaan Sosial
- 5) Program Penataan dan administrasi Pemerintahan Desa
- 6) Program Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat
- 7) Program Pembinaan SMK

2.6. Sasaran Strategis 3.1.2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran **Menurunnya Pengangguran Terbuka**, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,43	4,49	98,66	4,00	89,09
2	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,70	7,38	77,24	5,50	74,53
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3.1.2			87,95			81,81	

Berdasarkan Tabel 3.9 Sasaran Strategis 3.1.2 Menurunnya Pengangguran Terbuka, dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 87,95 % atau kategori **“Baik”**. Artinya bahwa di Jawa Tengah tingkat pengangguran masih 4,51 % dari jumlah penduduk yang ada dan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata baru tercapai 81,81%. Untuk indikator TPT realisasi Tahun 2019 tersebut sebesar 4,49, apabila dibandingkan dengan target 4,43, tercapai 98,66%. Dibanding capaian nasional 5,28 turun 0,79 %, tetapi bila dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,23, tingkat pengangguran terbuka naik 0,26. Untuk indikator Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu Capaian realisasi Tahun 2019 tersebut sebesar 7,38, apabila dibandingkan dengan target 5,70, tercapai 80,17%, tetapi apabila dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 7,35, turun 0,24 menjadi lebih baik.



Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah Februari 2019 sebanyak 18,59 juta orang, bertambah 0,36 juta orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,21 persen. Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 10 ribu orang, akan tetapi kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga angka TPT turun sebesar 0,01 persen poin menjadi 4,22 persen pada Februari 2019 dibandingkan dengan Februari 2018. TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Diploma, yaitu sebesar 8,41 persen. Sebanyak 10,73 juta orang (60,24 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal naik sebesar 0,22 persen poin dibanding Februari 2018. Tingginya pengangguran terbuka di Jawa Tengah, disebabkan oleh:

1. Tidak sesuainya kompetensi ilmu dengan kebutuhan di dunia kerja dan kualifikasi yang dimiliki atau kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja disebabkan oleh kurang adanya link and match antara dunia pendidikan (lembaga ketrampilan/ LPK/ BLK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)).
2. Produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah pada tingkat pendidikan dan ketrampilan (kompetensi) pada usia produktif sebagian besar berasal dari lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SLTA yang tidak memiliki skill yang cukup untuk merespons perkembangan teknologi di era digitalisasi.

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan :

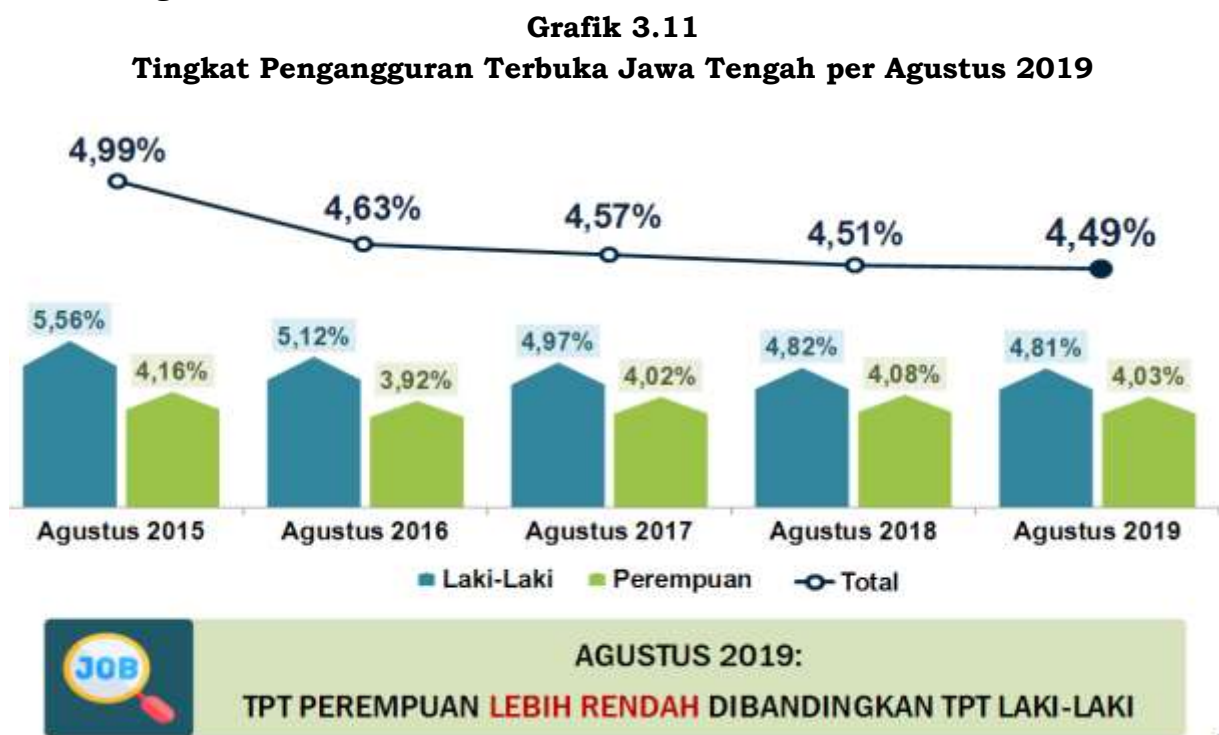
1. Dilakukan sinergitas dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan lembaga pendidikan dalam hal :
 - a. Penyusunan kurikulum;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Instruktur yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - d. Laboratorium yang mereplikakan perkembangan industri.
2. Melakukan berbagai hal :
 - a. Identifikasi dan pengukuran terhadap penyebab rendahnya produktivitas;
 - b. Seleksi magang Jepang dan pelatihan/pemagangan dalam dan luar negeri;
 - c. Penyebaran pemahaman produktivitas yang diterapkan dalam kegiatan.
3. Upaya lain yang dilakukan melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja dengan didukung para Pejabat fungsional pengantar kerja, telah



berupaya melakukan fasilitasi penyediaan informasi lowongan pekerjaan yang dilakukan melalui *job fair*/pameran kerja melalui Bursa Kerja Online (BKOL). BKOL memberi kemudahan kepada pengusaha melalui entri secara *online* lowongan yang tersedia di perusahaan.

4. Dalam rangka meminimalisir biaya produksi, perusahaan merekrut tenaga kerja baru dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan bebas dari kewajiban untuk memenuhi perlindungan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan UMK, uang pesangon, THR, dan BPJS sesuai yang di amanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 3.1.2 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.261.037.000,- realisasi sebesar Rp 24.504.094.057,- sehingga sisa sebesar Rp 756.942.943,- atau 3,00%, sebagai gambaran untuk perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana Grafik 3.11 dibawah ini :



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2019

Untuk mencapai Sasaran Strategis 3.1.2 **Menurunnya Pengangguran Terbuka**, program prioritas yang dilaksanakan adalah :

- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 2) Peningkatan kesempatan kerja;
- 3) Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;



- 4) Peningkatan kepatuhan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

2.7. Sasaran Strategis 3.2.1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dan Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	2,90	1,36	46,90	3,10	43,87
2	Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	4,85	5,19	107,01	5,65	91,86
3	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,67	5,98	105,47	5,90	101,36
4	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,15	12,47	395,87	3,20	389,69
5	Pertumbuhan Investasi	%	9,00	0,39	4,33	10,00	3,90
6	Nilai Tukar Petani	Angka	101,2	104,03	102,80	103,15	100,85
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3.2.1					127,06		121,92

Berdasarkan Tabel 3.10 Sasaran Strategis 3.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dan Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah, dengan enam Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 127,06 % atau kategori **“Sangat Baik”**. Artinya bahwa peran investasi terhadap ekonomi daerah sudah sangat bagus dalam rangka meningkatkan sektor unggulan daerah di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 121,92% pada tahun kedua. Artinya untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran. Sementara itu untuk kondisi



perekonomian daerah Jawa Tengah di tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 5,41% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,31%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah mengalami penguatan dari 4,35 persen di tahun 2018 menjadi 5,19 persen di tahun 2019. Demikian juga sektor perdagangan mengalami penguatan dari 5,77% di tahun 2018 menjadi 5,98% di tahun 2019. Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan dari 2,63 persen di tahun 2018 menjadi 1,36 persen di tahun 2019. Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019 mengakibatkan tanaman pertanian dan perkebunan tidak tumbuh dengan baik sehingga produksinya menurun akibat puso.

Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan pertumbuhan, namun berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut mendorong pertumbuhan sektor ini. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan jaringan irigasi, bantuan penggunaan bibit/benih unggul dan bermutu, bantuan penggunaan pupuk berimbang, gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), fasilitasi pasca panen berupa bantuan alat pasca panen, bantuan alsintan, dan pengembangan sumberdaya petani dengan mendorong pemuda tani dalam bentuk bimbingan teknis petani milenial. Hal ini juga dilakukan dalam upaya mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) dari sisi produksi.

Upaya lain yang juga dilakukan dari sub sektor perikanan antara lain pengembangan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktifitas perekonomian masyarakat nelayan, pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring dan bubu), *coolbox*, alat bantu navigasi, serta bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil. Selain itu dengan peningkatan penjaminan kesehatan dan mutu ikan serta keamanan pangan melalui penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) bagi pemasok bahan baku di Jawa Tengah dan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan melibatkan TP PKK dan FORIKAN.

Sub sektor kehutanan juga telah mengupayakan berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan lapangan usaha ini terutama dengan melakukan penanaman bibit pohon ± 23.308,85 ha (eq. 9.323.540 batang), memfasilitasi berbagai kelompok masyarakat dengan memberikan sarana produktif bagi kelompok-kelompok masyarakat,



antara lain Kelompok Tani Hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan yang positif juga karena didukung dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut antara lain peningkatan mutu produksi industri, pendampingan kemitraan usaha antara industri kecil dengan industri inti, pendampingan dan fasilitasi standarisasi produk, fasilitasi pendaftaran HAKI, peningkatan kualitas SDM dan sertifikasi kompetensi SDM, fasilitasi substitusi bahan baku impor, dan mendorong persebaran industri melalui pembukaan kawasan industri dan sentra UKM. Strategi lainnya yang telah dilakukan yaitu peningkatan ekspor non migas dengan membuka pasar baru tujuan ekspor, pemantauan dan publikasi harga pasar, pemanfaatan aplikasi pasar lelang komoditi, serta mendukung terwujudnya sistem logistik daerah dengan penyusunan data distributor dan data gudang barang pokok penting di Jawa Tengah. Salah satu strategi yang cukup mendukung pemasaran produk-produk IKM dan UKM Jawa Tengah adalah dengan digitalisasi ekonomi dengan mengembangkan *e-commerce* dan mendorong pemanfaatan *e-commerce* oleh pelaku usaha baik usaha kecil maupun menengah.

Pertumbuhan investasi juga terus didorong dengan berbagai strategi yang telah dilakukan di tahun 2019 antara lain dengan mengoptimalkan kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan LKPM melalui klinik LKPM. Selain itu juga dilakukan pengembangan promosi melalui digital promotion dengan platform media sosial, mendorong kemitraan usaha PMA/PMDN dengan UKM melalui *match making*. Optimalisasi peran Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk mendapatkan solusi penanaman modal. Mengadakan tur investasi yaitu fasilitasi calon investor yang serius terhadap proyek yang ditawarkan di Jawa Tengah. *Business meeting* dalam dan luar negeri. Peningkatan pelayanan perizinan juga terus dioptimalkan melalui pendampingan OSS, pelayanan perizinan melalui aplikasi SIAP Jateng (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan), dan layanan jemput bola (mobil pelayanan perizinan keliling), dan mendorong Kabupaten/Kota untuk mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Jawa Tengah telah juga dilakukan beberapa upaya antara lain percepatan penataan dan kerjasama pengelolaan 4 Kawasan KSPN/KSPP (Karimunjawa, Borobudur, Dieng dan Sangiran). Pengembangan dan pemberdayaan desa wisata (pembinaan pengelolaan desa wisata). Sertifikasi usaha jasa dan sarana pariwisata; sertifikasi SDM pariwisata dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif (kriya, kuliner, fashion dan seni pertunjukan).

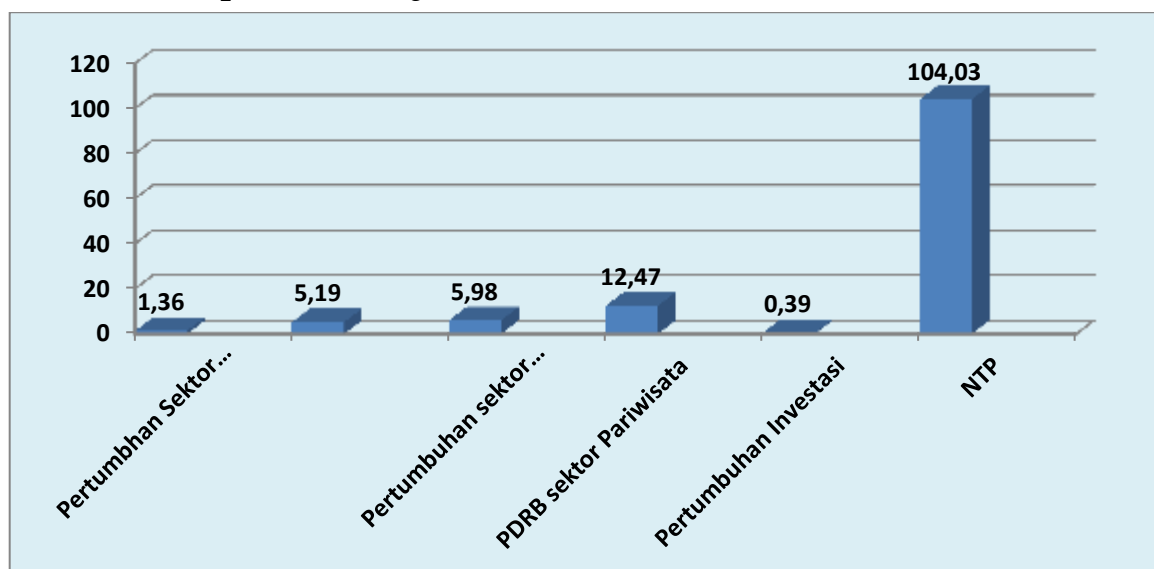


Pengembangan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Desain Brand, dan pengembangan Kota/Desa Kreatif. Promosi pariwisata skala nasional (digital promotion melalui sosial media) dan internasional (mengikuti pameran pariwisata skala internasional); serta penguatan sarana amenities pariwisata.

Langkah-langkah tersebut didukung dengan peningkatan infrastruktur tidak hanya jalan tetapi juga penyediaan air bersih, listrik, dan juga sanitasi. Peningkatan pelayanan transportasi dengan penyediaan transportasi aglomerasi (BRT), dan fasilitasi pengembangan bandara dengan tetap memperhatikan aspek kewilayahan dan menjaga kondusivitas wilayah.

Gambaran pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3.2.1 sebagaimana Grafik 3.12 dibawah ini :

Grafik 3.12
Capaian Kinerja Sasaran 3.2.1 Tahun 2019



Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 3.2.1 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 231.954.053.000,- dengan realisasi Rp 208.432.266.023,- sehingga efisiensi sebesar Rp 23.521.786.977,- atau 10,14%. Sasaran Strategis 3.2.1 dicapai melalui program:

- 1) Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- 2) Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- 3) Program Pelayanan Perizinan;
- 4) Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- 5) Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan;
- 6) Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan.



2.8. Sasaran Strategis 4.1.1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,31	7,53	103,01	7,45	101,07
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,68	98,75	13,17	96,28
Reata-rata Capaian Sasaran Strategis 4.1.1					100,88		98,68

Berdasarkan Tabel 3.11 Sasaran Strategis 4.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Secara Luas, dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 100,88% atau kategori **“Sangat Baik”**. Artinya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah sudah baik dilihat dari rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,53 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 12,68 tahun. Realisasi Tahun 2019 tersebut, apabila dibandingkan dengan capaian nasional 8,34 lebih rendah 0,81%. Untuk harapan lama sekolah realisasi Tahun 2019, apabila dibandingkan dengan capaian nasional 12,95% lebih rendah 0,27%, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 98,68%. Artinya hampir memenuhi target yang telah ditetapkan pada akhir perencanaan jangka menengah daerah.

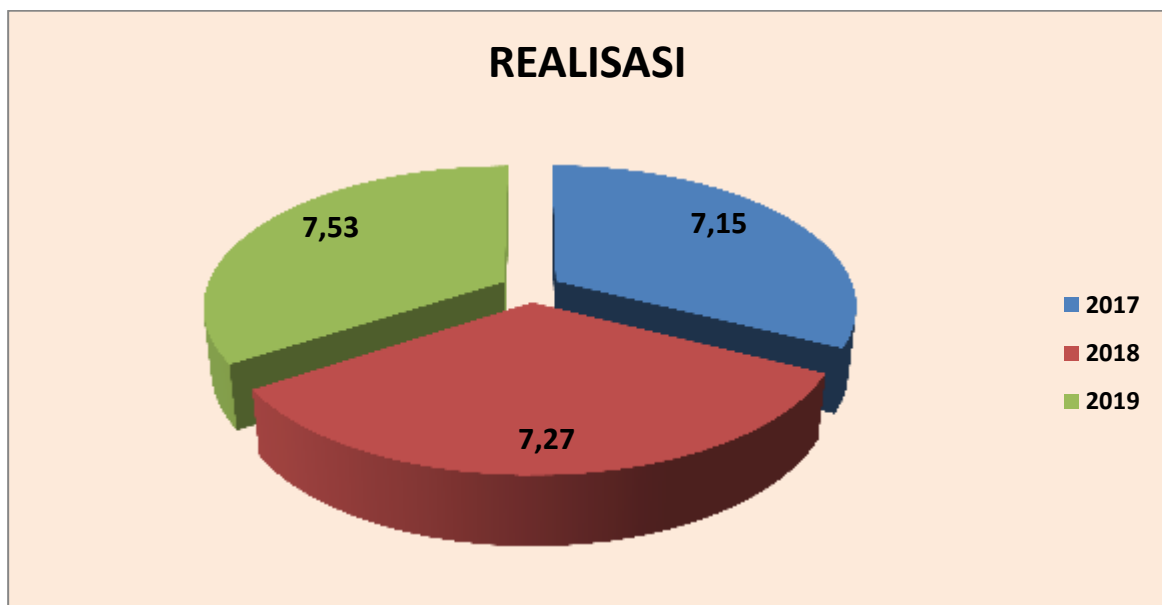
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia di Jawa Tengah antara lain dilakukan melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan yang telah diupayakan antara lain dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Peningkatan kualitas dan distribusi sarana prasarana pendidikan yang sesuai standar, peningkatan kualitas guru dan distribusinya secara merata. Peningkatan akses layanan pembiayaan pendidikan dengan pemberian BSM untuk 10.000 siswa SMA, SMK dan SLB yang kurang mampu, BOS untuk sekolah negeri dan swasta, BOSDa untuk sekolah swasta, serta BOP untuk SMA, SMK dan SLB Negeri. Untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong pendidikan nonformal melalui pendidikan Paket A/B/C di Kabupaten/Kota terutama bagi penduduk yang rentan putus sekolah atau memiliki kendala bersekolah formal.

Peningkatan literasi bagi masyarakat juga terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu untuk masyarakat melalui berbagai program diantaranya pengembangan perpustakaan digital (iJateng), perpustakaan keliling dengan mobil pustaka, internalisasi gerakan wajib membaca untuk anak sekolah, dan sebagainya. Progres capaian kinerja Sasaran Strategis 4.1.1 sebagaimana grafik 3.13 dibawah ini.

Gragfik 3.13
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2019

Salah satu permasalahan/tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan msyarakat secara luas adalah :

- 1) Masih adanya anak tidak sekolah/ anak putus sekolah karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi.
- 2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga Guru dan tenaga kependidikan.
- 3) Masih banyaknya sekolah yang status tanahnya belum milik Pemerintah Provinsi.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 4.1.1 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 2.210.800.944.000,- terealisasi sebesar Rp 2.099.288.601.031,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 111.512.342.969,- atau sebesar 5,04%.



Program prioritas yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pembinaan Pendidikan Khusus;
- 2) Program Pembinaan SMA;
- 3) Program Pembinaan SMK;
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan
- 5) Program Pembinaan Guru dan dan Tenaga Kependidikan.

2.9. Sasaran Strategis 4.1.2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.12 dibawah ini:

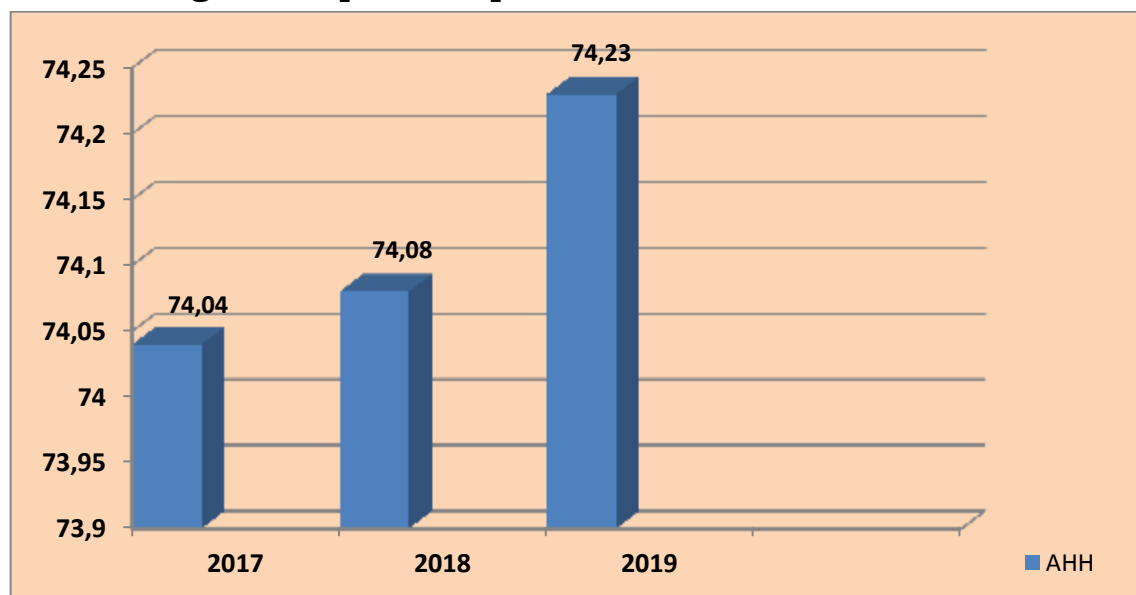
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,06	74.23	100.19	74,10	100.18
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4.1.2					100,19		100,18

Berdasarkan Tabel 3.12 Sasaran Strategis 4.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 100,19% atau kategori “**Sangat Baik**”. Artinya harapan hidup masyarakat Jawa Tengah semakin baik dengan indikasi derajat kehidupan masyarakat di Jawa Tengah semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 100,18%. Realisasi Tahun 2019, apabila dibandingkan dengan capaian nasional 71,20 lebih tinggi 3,03%. Capaian kinerja untuk tahun 2019 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam PK sudah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia terus dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia. Perkembangan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah tahun 2017 – 2019 sebagaimana grafik 3.14 sebagai berikut :



Grafik 3.14
Angka Harapan Hidup dari tahun 2017-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, disebabkan oleh Peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan antara lain dengan program inovasi 5 Ng (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masuk dalam nominasi penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 yang salah satu indikator penilaian adalah kebaruan inovasi daerah melalui program 5 Ng. Program 5 Ng dilaksanakan dalam empat fase yaitu fase sebelum hamil, kehamilan, persalinan dan fase nifas. Perlu diciptakan suatu kondisi dimana semua ibu hamil terpantau, agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga ibu selamat dan bayi sehat. Program unggulan Gubernur yaitu Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD), RSTD merupakan keterbukaan rumah sakit dalam memberikan aksesnya kepada masyarakat. Dalam program RSTD, rumah sakit yang selama ini berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, mulai bergerak memperkuat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif dengan tujuan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Salah satu permasalahan/tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah kematian ibu akibat persalinan, tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu semata seperti kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, melainkan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Artinya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus menyasar lebih dari satu insititusi, dan turut melibatkan masyarakat sipil dalam



prosesnya. Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 4.1.2 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.136.008.799.000,- realisasi sebesar Rp 1.807.812.429.260,- sehingga efisiensi sebesar sebesar Rp 328.196.369.740,- atau 15,36%.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program prioritas yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- 2) Program Pelayanan Kesehatan;
- 3) Program Sumberdaya Kesehatan;
- 4) Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- 5) Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 6) Program Pelayanan dan Pendukung BLUD;
- 7) Program Kesehatan Masyarakat.

2.10. Sasaran Strategis 4.1.3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.13 dibawah ini:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,00	91,89	99,88	92,25	99,61
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4.1.3					99.88		99.61

Berdasarkan Tabel 3.13 Sasaran Strategis 4.1.3 Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak, Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 99,88% atau kategori “ **Baik**”. Artinya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 99,61%. Artinya untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran meskipun di tahun kedua perencanaan ini rata-rata sudah tercapai sebesar 99,88%.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 4.1.3 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.126.240.000,- dengan realisasi Rp 8.033.662.655,- (98,66%).



2.11. Sasaran Strategis 4.2.1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Air, Udara serta Tutupan Lahan***, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2023	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kualitas Air	Angka	48,77	50,47	103,49	50,07	100,80
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,51	84,81	100,35	85,11	99,65
3	Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76	65,73	98,46	66,76	98,46
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4.2.1					100,77		99,64

Berdasarkan Tabel 3.14 Sasaran Strategis 4.2.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara serta Tutupan Lahan, dengan tiga Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 100,77% atau kategori **“Sangat Baik”**. Artinya kualitas air, udara dan tutupan lahan di Jawa Tengah tergolong sangat baik. Realisasi Tahun 2019, apabila dibandingkan dengan capaian nasional 65,15 lebih tinggi 1,74%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 99,64%. Untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran meskipun di tahun kedua perencanaan ini rata-rata sudah tercapai.

Terjadinya penurunan kualitas air, udara serta tutupan lahan di Jawa Tengah, disebabkan oleh manusia yang terlalu mengeksplere alam secara besar-besaran guna kepentingan pribadi. Permasalahan/ tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas air, udara serta tutupan lahan adalah :

- 1) Dalam rangka penentuan titik imbuhan air tanah masih belum sinkron dengan kondisi geologis wilayah dengan rencana imbuhan air tanah, misalnya air tanah yang berkurang di Solo belum tentu titik imbuhan air tanah berada di Solo tetapi di tempat yang lebih tinggi, posisi batuan, tebal solum tanah.
- 2) Adanya beberapa home industri baru belum membuat IPAL sehingga air disekitar tercemar.
- 3) Pembangunan jalan tol mengurangi lahan hijau dan sampai saat belum ada ganti lahan hijau.



- 4) Kurang pekanya Sumber daya manusia dalam menjaga alam.
- 5) Kurang sinkronnya kegiatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6) Alih fungsi lahan semakin tinggi.
- 7) Kurangnya pengendalian terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor.
- 8) Limbah industri yang tidak terkontrol terutama industri rumah tangga.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 4.2.1 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 70.894.544.000,- terealisasi sebesar Rp 66.163.921.065,- sehingga efisiensi sebesar Rp 4.730.622.935,- atau 6,67%. Untuk mewujudkan Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan, Sasaran ini didukung dengan program sebagai berikut:

- 1) Program pengolan sampah, limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan;
- 2) Program penataan, pengajian dampak dan pengembangan kapasitas;
- 3) Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
- 4) Program penyuluhan dan penegakan hukum LHK;
- 5) Program Pemanfaatan Hutan;
- 6) Program Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.12. Sasaran Strategis 4.2.2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana**, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2019			Target Akhir RPJMD 2018	% Capaian thd trgt akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,52	3,52	100,00	3,60	97,78
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4.2.2			100,00			97,78	

Berdasarkan Tabel 3.15 Sasaran Strategis 4.2.2 Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana, dengan Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 100,00% atau kategori **“Baik”**.



Artinya kesiapan masyarakat Jawa Tengah terhadap penanggulangan bencana sudah sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD rata-rata sudah tercapai 97,78%. Artinya untuk mencapai target akhir perencanaan jangka menengah daerah tetap harus dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja sasaran meskipun di tahun kedua perencanaan ini rata-rata sudah tercapai.

Salah satu permasalahan/tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana adalah :

- 1) Perhitungan akumulasi dari Kab/Kota, apabila Kab/Kota tidak aktif maka akan mempengaruhi nilai provinsi
- 2) Perubahan formulasi, pada waktu penetapan target masih menggunakan skala 1-5 pada saat penilaian skala 0-1 perubahan nilai perhitungan akan dilaksanakan pada perubahan RPJMD belum sinkron kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 4.2.2 tersebut pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.930.000.000,- dengan realisasi Rp 16.793.543.659,- sehingga efisiensi sebesar Rp 1.136.456.341,- atau sebesar 6,34%. Sasaran ini didukung dengan Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

E. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2019 sebagaimana tabel 3.16 dibawah ini :



Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2019 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31 Desember
2019

No.	Uraian	Target Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
1	PENDAPATAN	26.340.639.488.000	25.857.328.082.654	98,17
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.488.333.544.000	14.436.852.600.981	99,64
1.1.1	Pajak Daerah	11.999.332.158.000	11.951.897.231.864	99,60
1.1.2	Retribusi Daerah	121.453.464.000	114.198.845.371	94,03
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	512.701.752.000	512.701.993.939	100,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.854.846.170.000	1.858.054.529.807	100,17
1.2	DANA PERIMBANGAN	11.766.733.523.000	11.334.903.060.673	96,33
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	786.265.656.000	575.968.321.634	73,25
1.2.2	Dana Alokasi Umum	3.784.512.513.000	3.784.512.513.000	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	7.195.955.354.000	6.974.422.226.039	96,92
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.572.421.000	85.572.421.000	100,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.184.000.000	23.184.000.000	100,00
1.3.2	Dana Insentif Daerah	62.388.421.000	62.388.421.000	100
2	BELANJA	27.750.939.235.000	26.205.563.694.894	94,43
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.575.207.901.000	18.753.613.138.436	95,80
2.1.1	Belanja Pegawai	6.069.464.801.000	5.808.240.323.312	95,70
2.1.2	Belanja Hibah	5.351.634.443.000	5.203.923.021.000	97,24
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	45.235.750.000	44.660.500.000	98,73
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	5.489.857.856.000	5.248.472.302.270	95,60
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah	2.596.015.051.000	2.445.654.560.648	94,21



No.	Uraian	Target Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
	Desa			
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000	2.662.431.206	11,58
2.2	BELANJA LANGSUNG	8.175.731.334.000	7.451.950.556.458	91,15
2.2.1	Belanja Pegawai	798.565.706.000	722.099.391.326	90,42
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.996.045.454.000	4.539.211.712.565	90,86
2.2.3	Belanja Modal	2.381.120.174.000	2.190.639.452.567	92,00
	Jumlah	54.091.578.723.000	52.062.891.777.548	96,25
	Surplus/(Defisit)	(1.410.299.747.000)	(348.235.612.240)	24,69
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.705.636.198.000	1.630.636.197.897	95,60
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.612.602.481.000	1.612.602.481.841	100
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	93.033.717.000	18.033.716.056	19,38
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	295.336.451.000	220.336.450.544	74,61
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	180.000.000.000	180.000.000.000	100
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	115.336.451.000	40.336.450.544	34,97
	Pembiayaan Neto	1.410.299.747.000	1.410.299.747.353	100
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	1.062.064.135.113	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 2019

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang paling utama berasal dari pajak dan retribusi daerah.



Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun anggaran 2019 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan hasil rangkuman laporan dari Perangkat Daerah Provinsi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan laporan dari Bappeda Kabupaten/Kota kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2019 terdiri dari alokasi Anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp 1.007.723.556.000,- diampu oleh 20 Perangkat Daerah. Target dan Realisasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi meliputi target keuangan: 91,03% realisasi keuangan 98,19% (deviasi -3,60%) dan target fisik 92,52% realisasi fisik 98,46% (deviasi -0,92%).

Proporsi total anggaran APBN di Jawa Tengah yang bersumber dari dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota pada Triwulan III Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.527.308.611.000,- untuk tahun 2019 sebesar Rp 1.007.723.556.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 519.585.055.000,- pada triwulan IV Tahun 2019 Karena adanya perubahan DIPA pada masing-masing Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menerima Dekonsentrasi ataupun Tugas Pembantuan. Alokasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 dapat digambarkan dalam Tabel 3.17 sebagai berikut :

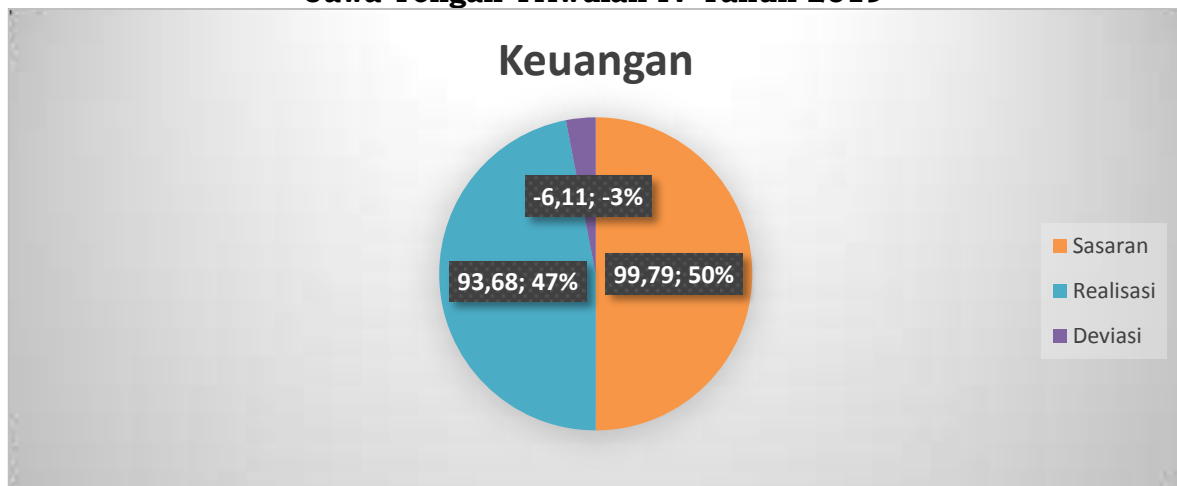
Tabel 3.17
Total Pagu Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Triwulan IV dan Tahun 2019

JENIS ANGGARAN	Anggaran TW IV (000)	REALISASI		DEVIASI	
		Keu	Fisik	Keu	Fisik
I. Dekon dan TP Provinsi	Rp. 1.007.723.556.000	98,19	98,46	-3,60	-0,92
a. Dekonsentrasi	Rp 461.283.348.000				
b. TP Provinsi	Rp 546.440.208.000				
II. TP Kabupaten/Kota	Rp.409.311.377.500	75,01	77,64	-6,03	-0,52
JUMLAH	Rp 410.838.686.111				

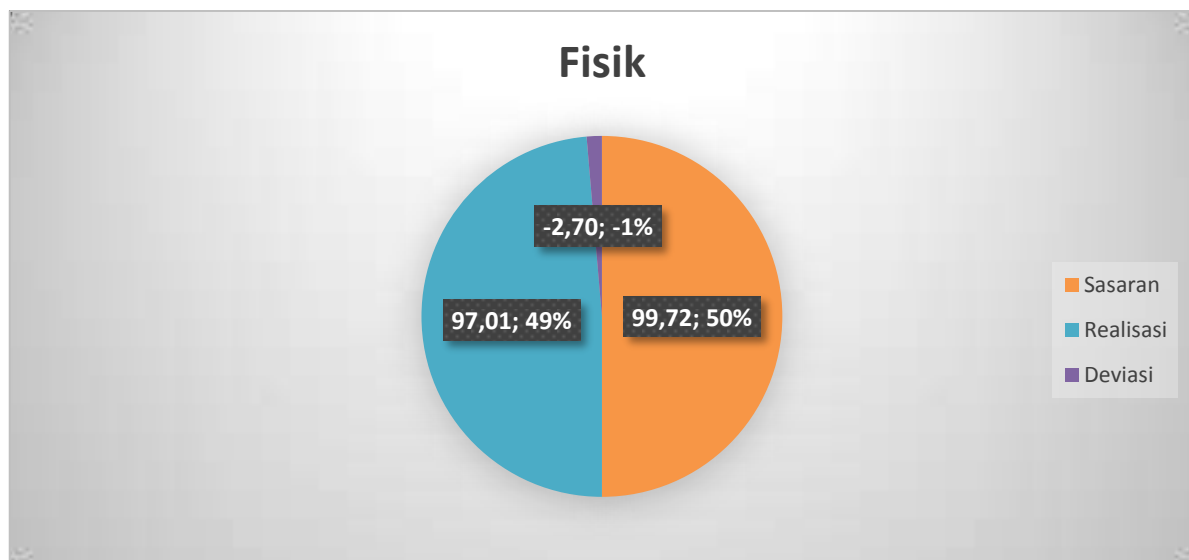
Sumber : BAPPEDA LITBANG Provinsi Jawa Tengah 2019



Gambar 3.2
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi
Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2019



Sumber : BAPPEDA LITBANG Provinsi Jawa Tengah 2019



Sumber : BAPPEDA LITBANG Provinsi Jawa Tengah 2019

Target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2019 masing-masing OPD ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut 3.18

TABEL 3.18
Target Dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV TA. 2019

NO	NAMA OPD	ANGGARAN TW IV(Rp. 000)			KEUANGAN			FISIK		
		DEKON	TP	TOTAL	(%)	R (%)	DEV	S (%)	R (%)	DEV
1	BAPPEDA	1.144.613		1.144.613	100,00	98,55	-1,45	100,00	100,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	57.277.477		57.277.477	100,00	93,58	-6,42	100,00	100,00	0,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.678.656		5.678.656	100,00	90,73	-9,27	100,00	100,00	0,00
4	Dinas Sosial	32.758.682		32.758.682	100,00	97,30	-2,70	100,00	100,00	0,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.244.052		13.244.052	100,00	94,79	-5,21	100,00	100,00	0,00
6	Dinas Koperasi UKM	6.141.690		6.141.690	100,00	97,49	-2,51	100,00	100,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.081.627		21.081.627	84,79	84,79	0,00	89,32	89,32	0,00
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan	85.560.379	326.674.043	412.234.422	97,54	92,24	-5,30	98,23	94,28	-3,95



NO	NAMA OPD	ANGGARAN TW IV(Rp. 000)			KEUANGAN			FISIK		
		DEKON	TP	TOTAL	(%)	R (%)	DEV	S (%)	R (%)	DEV
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB	1.900.000		1.900.000	100,00	96,48	-3,52	100,00	100,00	0,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.521.019		4.521.019	100,00	86,82	-13,18	100,00	93,60	-6,40
11	Dinas Permadam Dan Dukcapil	169.544.857		169.544.857	96,70	96,40	-0,30	100,00	100,00	0,00
12	Dinas LH DAN Kehutanan	3.088.520		3.088.520	100,00	86,99	13,01	100,00	100,00	0,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	47.234.450		47.234.450	100,00	97,88	-2,12	100,00	97,75	-2,25
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		60.949.020	60.949.020	99,96	93,68	-6,28	99,96	95,49	-4,48
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	10.158.482		10.158.482	100,00	89,02	-10,98	100,00	100,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	680.495		680.495	100,00	97,49	-2,51	100,00	100,00	0,00
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.079.989		1.079.989	100,00	97,36	-2,64	100,00	100,00	0,00
18	Dinas PU, SDA dan Penataan Ruang		95.505.888	95.505.888	100,00	94,96	-5,04	100,00	99,26	-0,74
19	Dinas PU, Binamarga dan Ciptakarya		63.311.257	63.311.257	100,00	94,44	-5,56	100,00	99,50	-0,50
20	Biro Pemerintah, Otda Dan Kerjasama Setda Prov Jateng	188.360		188.360	84,80	84,80	0,00	100,00	100,00	0,00
JUMLAH		461.283.348	546.440.208	1.007.723.556	91,03	98,19	(3,60)	92,52	98,46	(0,92)

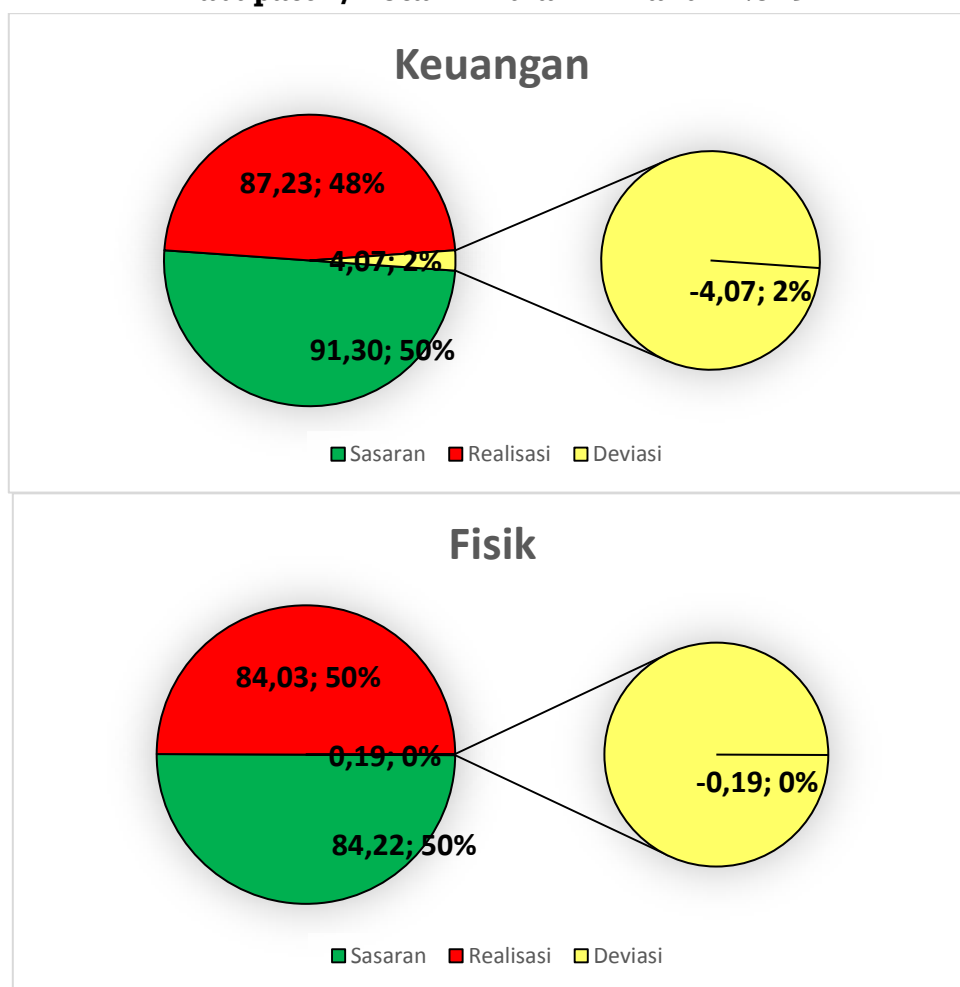
Sumber : BAPPEDA LITBANG Provinsi Jawa Tengah 2019

4. Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (17 Kab/Kota) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 409.311.377.500,- target keuangan: 91,30% realisasi keuangan 87,23% (deviasi keuangan: - 4,07%) dan target fisik 84,22 % realisasi fisik 84,03 % (deviasi fisik: - 0,19 %) seperti digambarkan pada Gambar 3.3 sebagai berikut:



Gambar 3.3
Target Dan Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2019



Sumber : BAPPEDA LITBANG Provinsi Jawa Tengah 2019

Target dan realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2019 masing-masing Kabupaten/Kota ditampilkan dalam Tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan per
Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	PAGU (Rp. 000)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
			S	R	D	S	R	D
1	Kab. Temanggung	15.093.622	100,00	95,60	-4,40	100,00	100,00	0,00
2	Kab. Jepara	5.581.768	100,00	93,89	-6,11	100,00	100,00	0,00
3	Kab. Pati	14.019.000	100,00	95,56	-4,44	100,00	100,00	0,00
4	Kab. Magelang	15.093.768	100,00	95,39	-4,61	100,00	100,00	0,00
5	Kab. Rembang	6.688.768	100,00	89,14	-10,86	100,00	100,00	0,00
6	Kab. Brebes	4.240.000	100,00	99,94	-0,06	100,00	100,00	0,00
7	Kab. Demak	9.706.768	100,00	98,98	-1,02	100,00	100,00	0,00
8	Kab. Cilacap	1.203.768	100,00	90,75	-9,25	0,00	0,00	0,00
9	Kota Semarang	6.300.000	86,62	86,62	0,00	100,00	100,00	0,00



NO	KAB/KOTA	PAGU (Rp. 000)	KEUANGAN (%)			FISIK (%)		
			S	R	D	S	R	D
10	Kab. Wonosobo	6.158.390	50,00	33,71	-16,29	0,00	0,00	0,00
11	Kab. Blora	4.000.000	97,14	97,14	0,00	100,00	97,14	-2,86
12	Kab. Pekalongan	40.993.477	94,94	94,94	0,00	99,68	99,68	0,00
13	Kab. Purworejo	950.000	32,08	32,08	0,00	32,08	32,08	0,00
14	Kab. Sragen	4.317.402	99,75	99,18	-0,57	100,00	99,63	-0,37
15	Kab. Banyumas	4.000.000	91,53	86,00	-5,53	100,00	100,00	0,00
16	Kab. Boyolali	15.414.219	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17	Kota Salatiga	500.000	100,00	94,00	-6,00	100,00	100,00	0,00
JUMLAH		409.311.377.500	91,30	87,23	-4,07	84,22	84,03	-0,19



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada awal perencanaan jangka menengah Tahun 2019 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari empat Misi, enam Tujuan dan 12 Sasaran strategis yang diukur dengan 40 Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 100,77% atau kategori **“Sangat Baik”**. Untuk Indikator tujuan rata-rata tercapai 100,60% atau kategori **“Sangat Baik”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata tercapai sebesar 104,84% atau kategori **“Sangat Baik”**.

Secara rinci dapat dijelaskan hasil pengukuran kinerja terhadap 12 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa tujuh Sasaran Strategis (58,33%) tercapai dengan dikategorikan **“Sangat Baik”** sedangkan lima Sasaran Strategis atau (41,67%) tercapai dengan kategori **“Baik”**.

Pencapaian target kinerja dari 12 Sasaran Strategis 2018-2023 untuk tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp 54.091.578.723.000,- dan terealisasi Rp 52.062.891.777.548,- atau 96,25%, meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.575.207.901.000,- dengan realisasi Rp 18.753.613.138.436,- atau 95,80% dan Belanja Langsung sebesar Rp 8.175.731.334.000,- dengan realisasi Rp 7.451.950.556.458,- atau 91,15% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 348.235.612.240,- Data Per 25 Februari 2020.

Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Rp 1.007.723.556.000,00,- dengan target 91,03% realisasi keuangan 98,19% (deviasi: -3,60%) dan target fisik 92,52% realisasi fisik 98,46% (deviasi -0,92%), sedangkan Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp 409.311.377.500,00,- Target keuangan 91,30% realisasi keuangan 87,23% (deviasi keuangan: -4,07%) dan target fisik 84,22% realisasi fisik 84,03% (deviasi fisik: -0.19%).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 100,77% atau kategori **“Sangat Baik”**. Hal tersebut artinya capaian kinerjanya melampaui target kinerja yang ditetapkan.



B. Progres Penyelesaian Issu Strategis

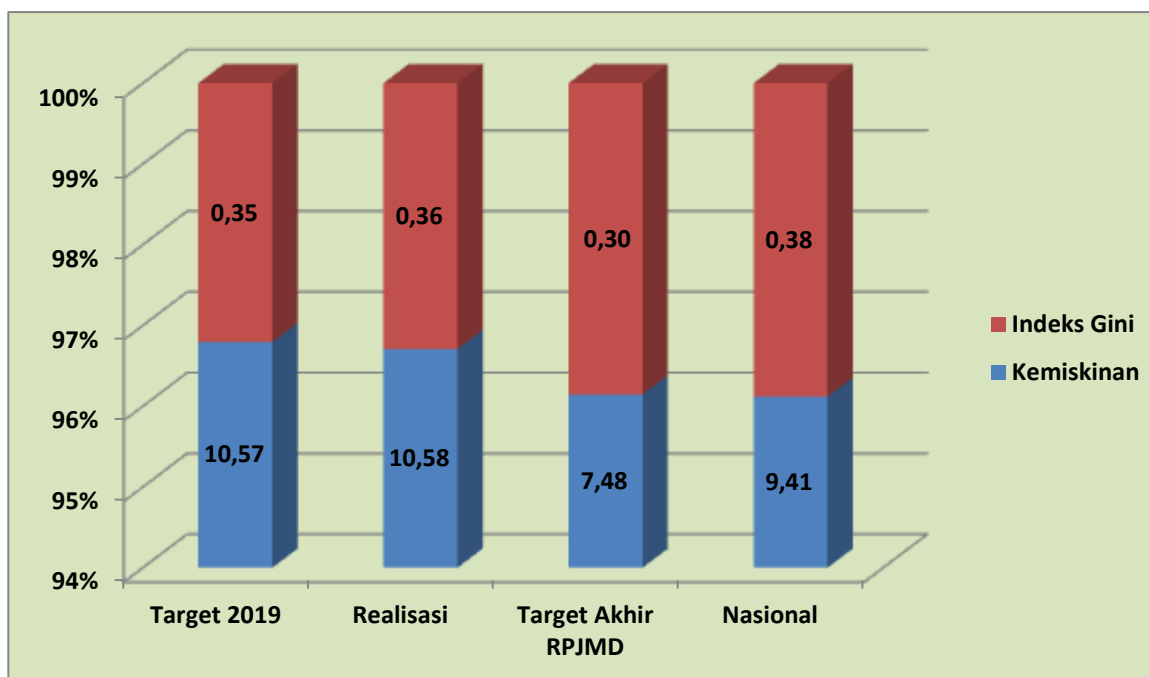
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pada Tahun 2019, progres penyelesaian terhadap Issu Strategis Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan, maka isu tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, melalui Misi ke tiga Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran, dengan tujuan Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata ini akan diselesaikan secara bertahap melalui Sasaran Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan dan kelompok rumah tangga desil terbawah dan Menurunkan Pengangguran Terbuka dengan sembilan indikator kinerja, untuk angka kemiskinan dengan angka 10,58 per September 2019 terjadi penurunan 0,61 point dibandingkan angka September 2018, tetapi jika dibandingkan target yang harus dicapai di tahun 2019 sudah tercapai 99,91% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 7,48 sudah tercapai sebesar 70,70%. Kesenjangan yang diukur dengan Indeks Gini realisasi di tahun 2019 sebesar 0,36, dibandingkan dengan target sebesar 0,35 sudah tercapai sebesar 97,22%, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,30 sudah tercapai 83,33%. Dibawah ini Grafik 4.2 progres penyelesaian isu kemiskinan melalui misi ke tiga RPJMD 2018-2023.



Grafik 4.2
Progres Penyelesaian Isu Kemiskinan

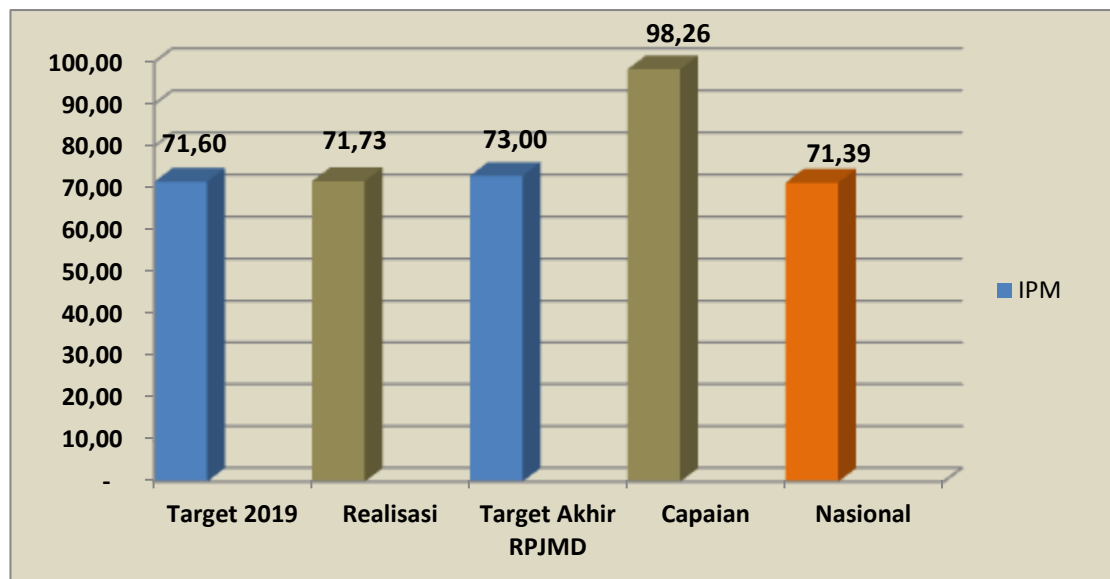


b) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 diselesaikan dengan Misi 4 : Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan, misi ini dilaksanakan dengan tujuan sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing, tujuan ini dilaksanakan dengan tiga sasaran. berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator IPM dan empat indikator sasaran, maka disimpulkan untuk indikator IPM target 2019 sebesar 71,60 terealisasi sebesar 71,73 atau 100,18% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 73,00 sudah tercapai sebesar 98,26%. Untuk capaian empat indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 100,38%. Dibawah ini grafik progres penyelesaian isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia tahun 2019.



Grafik 4.3
Kualitas dan Daya Saing SDM

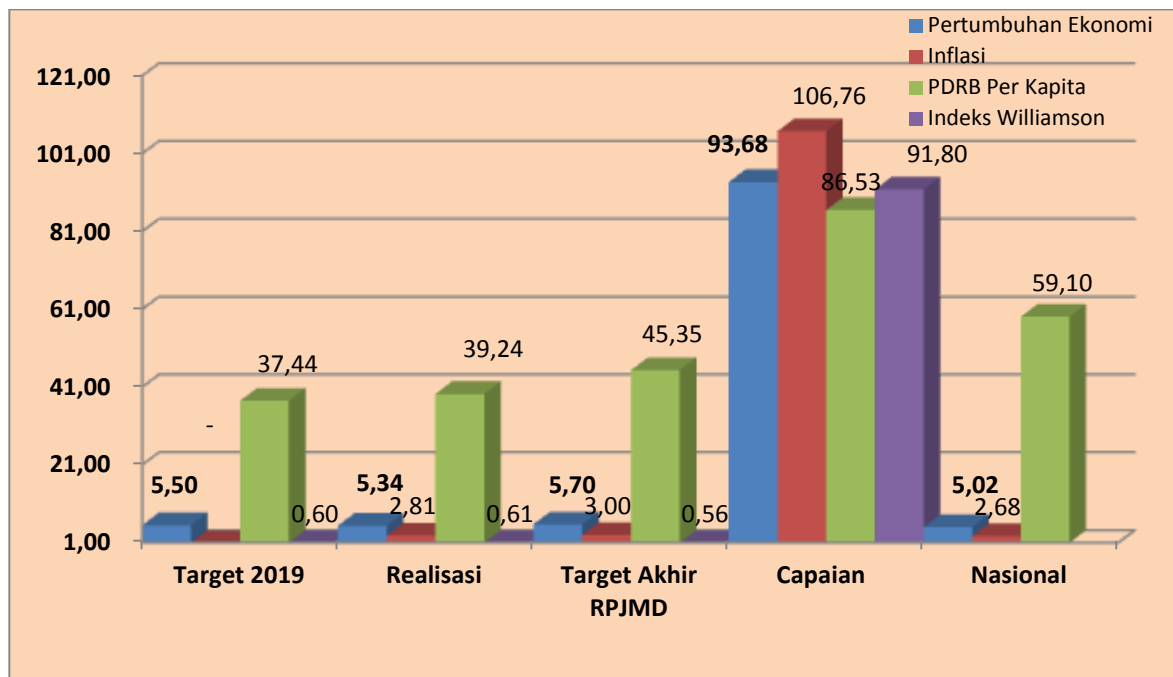


c) Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha

Penyelesaian isu daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha melalui Misi ke tiga dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan, melalui sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2019 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi target 5,50 tercapai 5,34 atau tercapai sebesar 97,09%, Inflasi dengan target 3,5 + 1 realisasi 2,81 atau 106,76%, PDRB Per Kapita target sebesar 37,44 terealisasi sebesar 39,24 atau 104,81% sedangkan Indek Williamson target sebesar 0,60 terealisasi 0,61 atau 98,36%, dengan demikian rata-rata capaian untuk indikator tujuan sebesar 101,76%. dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.



Grafik 4.4
Daya Saing Ekonomi

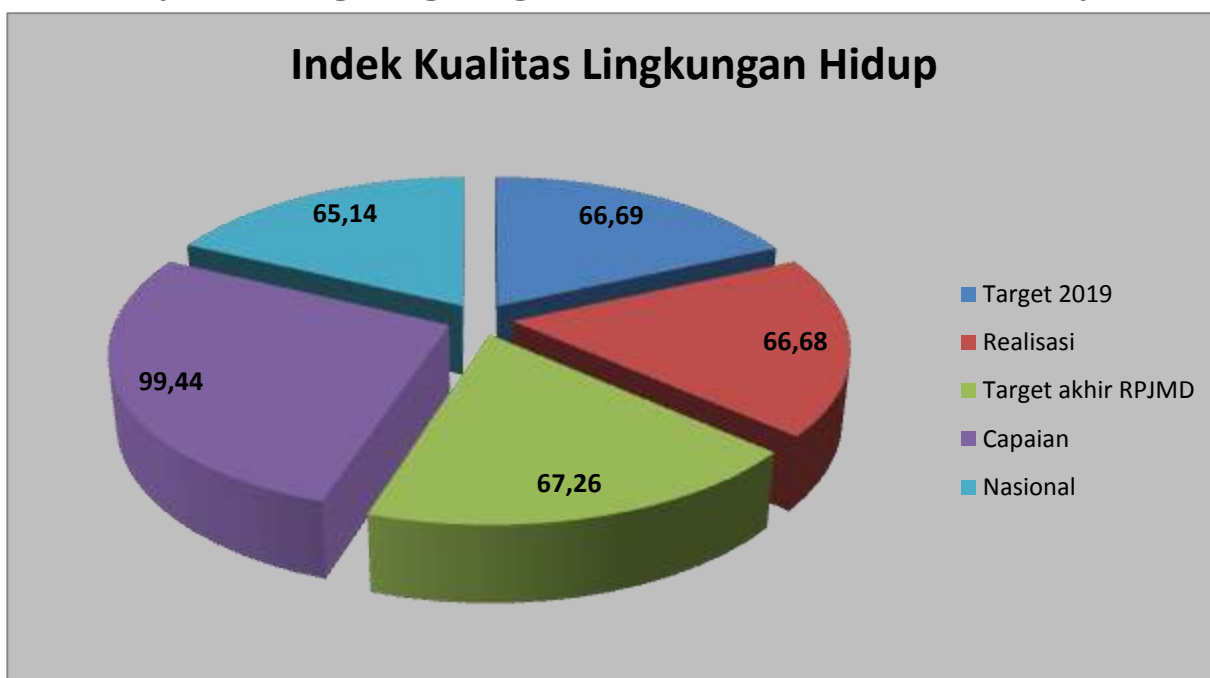


d). Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.

Penyelesaian isu keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam melalui Misi ke empat menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan dengan tujuan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan melalui sasaran meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan dan meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2019 untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup target 66,69 tercapai 66,88 atau tercapai sebesar 100,28%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 67,26 sudah tercapai sebesar 99,44%. Sedangkan capaian dari dua sasaran dan empat indikator rata-rata tercapai sebesar 100,39%, dibawah ini grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas dengan capaian nasional.



Grafik 4.5
Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

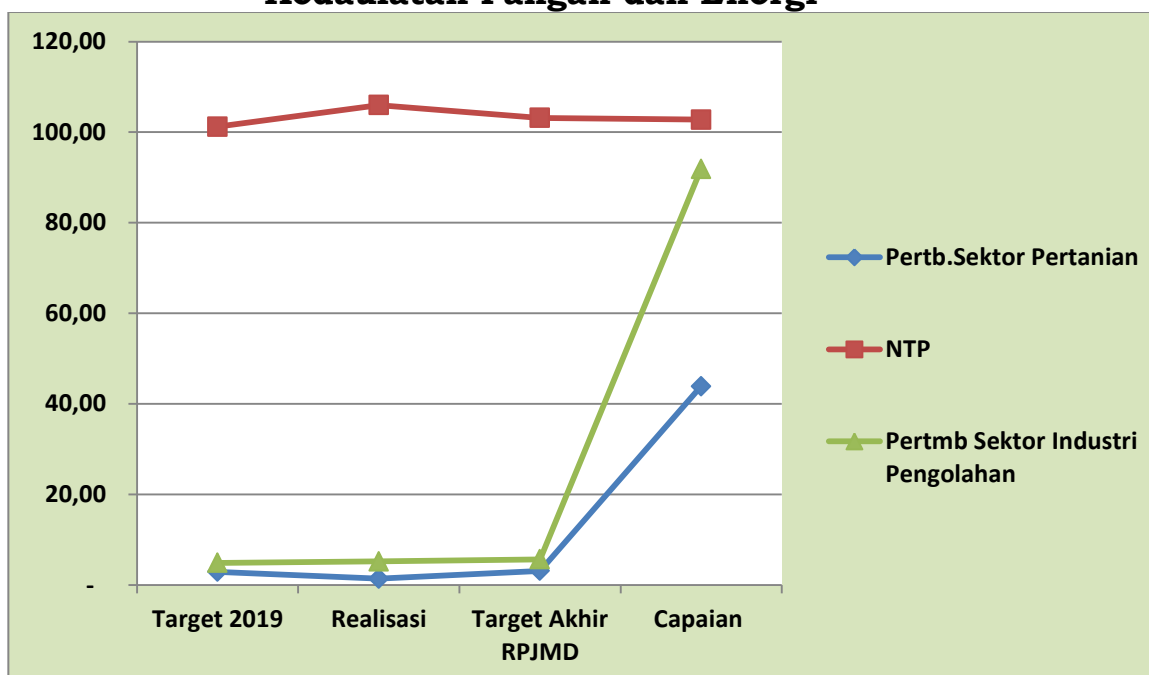


e). Kedaulatan Pangan dan Energi

Penyelesaian isu kedaulatan pangan dan energi melalui Misi ke tiga sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah, dengan tiga indikator kinerja. Hasil pengukuran terhadap indikator sasaran diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2019 untuk indikator Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan target 2,90 tercapai 1,36 atau tercapai sebesar 46,90%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 3,10 baru tercapai sebesar 43,87%, untuk Indikator Nilai Tukar Petani target 101,20 tercapai 106,00 atau tercapai sebesar 104,74%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 103,15 sudah tercapai sebesar 102,76%, sedangkan untuk Indikator Pertumbuhan sektor industri pengolahan target 4,85 tercapai 5,19 atau tercapai sebesar 107,01%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 5,65 sudah tercapai sebesar 91,86%, dibawah ini grafik progres penyelesaian isu kedaulatan pangan dan energi.



Grafik 4.6
Kedaulatan Pangan dan Energi

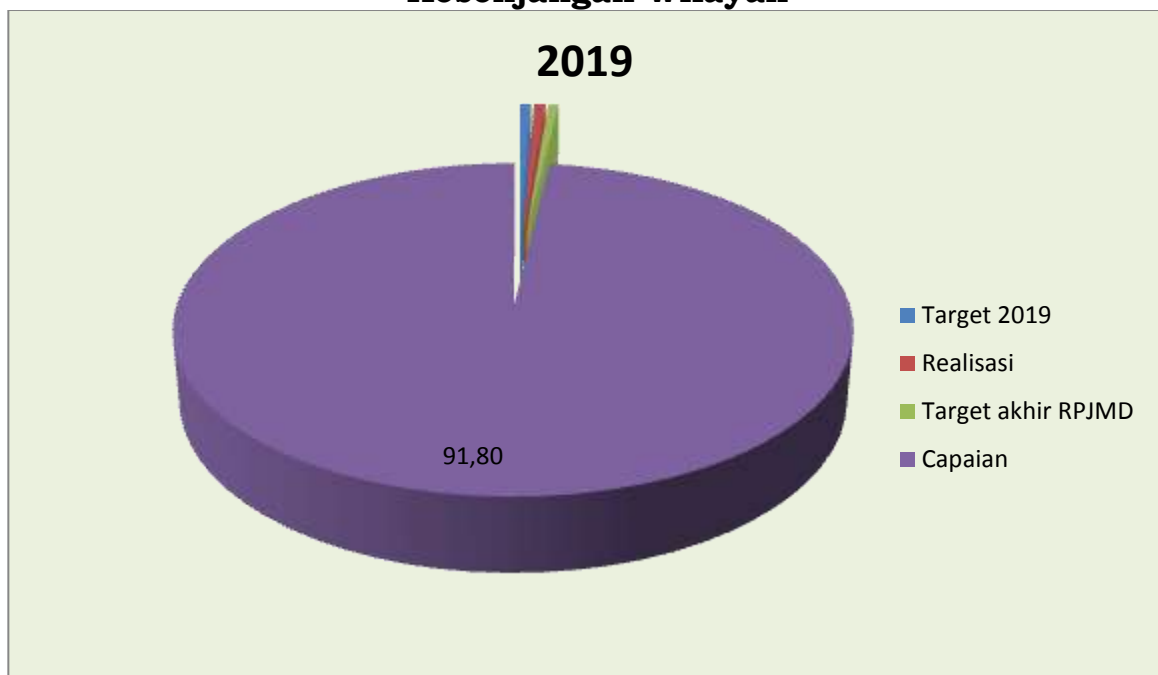


f). Kesenjangan wilayah

Penyelesaian isu kesenjangan wilayah melalui Misi ke tiga memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan dengan indikator Indeks Wiliamson. Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan tersebut diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2019 sebesar 0,60 tercapai 0,61 atau tercapai sebesar 98,36%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 0,56 sudah tercapai sebesar 91,80%. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,36, sedikit meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,71 persen. Artinya pengeluaran penduduk Jawa Tengah pada Triwulan III tahun 2019 masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Dibawah ini grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.



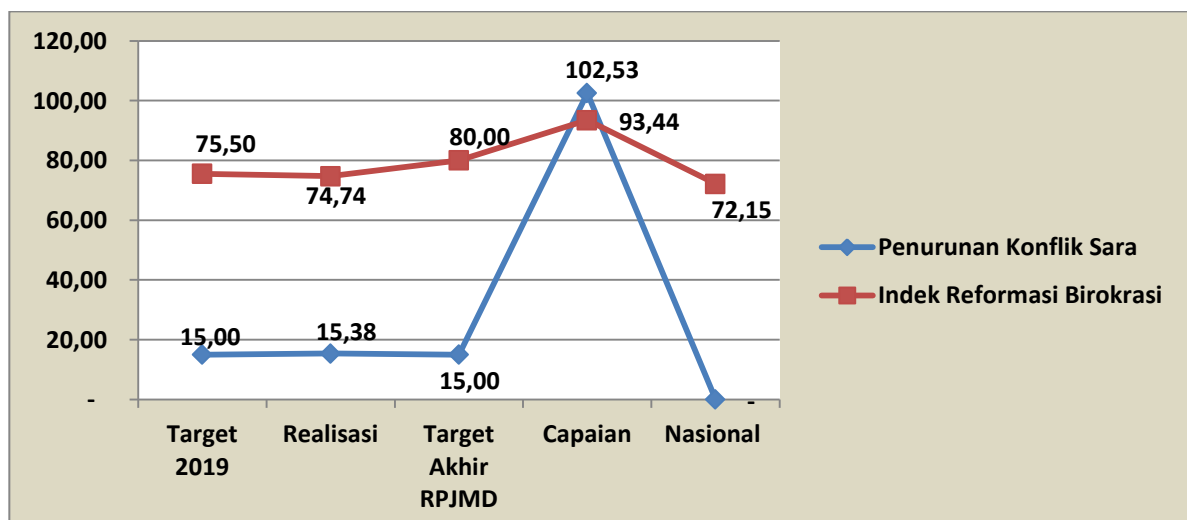
Grafik 4.7
Kesenjangan Wilayah



g). Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Penyelesaian isu tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah melalui Misi ke satu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Misi kedua mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tujuan mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup dan mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) melalui empat sasaran.

Grafik 4.8
Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah





Dari hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2019 untuk indikator penurunan konflik SARA target 15,00 tercapai 15,38 atau tercapai sebesar 102,53 %, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 15,00 sudah tercapai sebesar 102,53%. Untuk indikator Indek Reformasi Birokrasi target 75,5 tercapai 74,75* data pada tahun 2018, karena capaian tahun 2019 belum release oleh Kemenpan RB atau tercapai sebesar 99,01%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 80,00 sudah tercapai sebesar 93,44%. sedangkan untuk capaian dari empat sasaran dan sembilan indikator rata-rata tercapai sebesar 107,48%.

Semarang, Maret 2020



TABEL
ANALISIS TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi		Capaian 2019		Target Akhir RPJMD 2023	% Terhadap Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
					2017	2018	Target	Realisasi			
1	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup		Persentase penurunan konflik SARA	17,64	0	15,00	15.38	15,00	102.53	
			Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	78,70	74,80	74,40	72,50	76,60	94.65	73,83
				2) Persentase tindak pidana yang tertangani			80,00	80,98	90,00	89.98	
2	Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/ kota	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)		Indeks Reformasi Birokrasi	76,53	74,75	75,50	74.75	80,00	93.44	72,15
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat			80,00	82,29	88,00	93.51	
				2) Indeks Pemerintahan Sistem Elektronik Berbasis Elektronik (SPBE)		2,60	2,76	3,68	3,24	113.58	1,98
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	75,94	80,18	80,00	81,56	85,00	95.95	
				2) Indeks Persepsi Anti Korupsi			3,45	3,43	3,50	98.00	3,80
			Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	3) Opini BPK			WTP	WTP	WTP	100,00	
				1) Nilai Kematangan Organisasi Daerah			17,00	24,80	29,00	85.52	
3	Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		1) Angka Kemiskinan	13,01	11,32	10,57-9,57	10,58	7,48-6,48	70.70	9,41
				2) Indeks Gini	0,36	0,37	0,35	0,36	0,30	83.33	0,38
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	1) Persentase penduduk miskin perkotaan			9,54	8,99	9,17	102.00	
			terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	2) Persentase penduduk miskin pedesaan			12,74	12,26	11,97	97.63	
				3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah			464,81	374,90	523,15	71.66	
				4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah			60,85	65,96	61,75	106.82	
				5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah			30,75	35,51	29,75	83.78	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi		Capaian 2019		Target Akhir RPJMD 2023	% Terhadap Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
					2017	2018	Target	Realisasi			
		Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan		dengan keluhan kesehatan							
			Menurunnya pengangguran terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,57	4,23	4,43	4,49	4,00	89.09	5,28
				2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu			5,70		5,50	77.36	
			Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah terbawah	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,32	5,3-5,7	5.34	5,6-6,0	94.91	5,02
				2) Inflasi	3,71	2,82	3,5±1	2.81	3,0±1	106.76	2,68
				3) PDRB per kapita	26,14	36,78	37,44	36.78	45,35	81.10	59,1
				4) Indeks Williamson	0,62	0,633	0,60	0.61	0,56	91.80	
				1) Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan			2,90	1.36	3,10	43.87	
				2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan			4,85	5.19	5,65	91.86	
				3) Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa			5,67	5.98	5,90	101.36	
				4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD			3,15	3.17	3,20	99.06	
				5) Pertumbuhan investasi			9,00	0.39	10,00		
				6) Nilai Tukar Petani	100,40	102,25	101,20	104,03	103,15	102.76	
4	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,52	71,12	71,60	71.12	73,00	97,42	71,39
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	7,15	7,27	7,31	7,35	7,45	98.66	7,72
				2) Harapan Lama Sekolah	12,45*	12,57	12,84	12.63	13,17	95.90	12,91
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,04	74,08	74,09	74.18	74,10	100.11	71,2
		Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,89	92,21	92,00	91,95	92,25	99.67	90,99
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			66,69	66.88	67,26	99.44	65,14
			Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air			48,77	50.47	50,07	100.80	
				2) Indeks Kualitas Udara			84,51	84.81	85,11	99.65	
			Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	3) Indeks Tutupan Lahan			66,76	65.73	66,76	98.46	
				Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			3,52	3.52	3,60	97.78	

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi: Jawa Tengah.
Tahun : 2019.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Memberikan haluan pada 6 (enam) misi lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno		
1.1.1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno	1) Persentase capaian sasaran pembangunan 2) Laju Inflasi	- 4,50 ± 1,00
		3) Nilai Tukar Petani	103,27
2.1	Menurunkan jumlah penduduk miskin		
2.1.1	Menurunnya angka kemiskinan	1) Persentase Angka kemiskinan (%) 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (%)	10,40 - 9,93 27,13
		3) Laju Inflasi 4) Indeks Pembangunan Manusia	4,50 ± 1,00 71,59
2.2	Menurunkan jumlah penganggur		
2.2.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1). Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 3). Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	4,13 73,55 72,63
2.3	Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi		
2.3.1	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan,	1). Persentase penguatan cadangan pangan (%) 2). Persentase Daerah Rawan	100 60

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	Pangan	
		3). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) (%)	11,88
		4). Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) (%)	1,45
		5). Kontribusi Sektor Peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) (%)	2,39
2.3.2	Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	1). Rasio Elektrifikasi (%)	94,00
		2). Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) (%)	2,04
2.4	Mengembangkan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)		
2.4.1	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	1). Persentase Koperasi Sehat (%)	19,50
		2). Persentase Koperasi Aktif (%)	82,50
2.5	Meningkatkan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan		
2.5.1	Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan	Persentase Desa Mandiri/Berdikari (desa)	100
2.6	Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri		
2.6.1	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	1). Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) (%)	35,10
		2). Kontribusi perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)(%)	13,57
2.7	Meningkatnya Iklim dan Pengembangan Investasi		
2.7.1	Meningkatnya realisasi	1). Pertumbuhan Proyek PMA/PMDN	12

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	investasi	(%)	
		2). Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN (%)	12
2.8	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan		
2.8.1	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	1). Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,99
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,99
2.8.2	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	Rasio kab./kota menuju Kota Layak Anak (KLA) (%)	100
2.8.3	Meningkatnya ketersediaan keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan	1). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMALB/MA/Paket C .	80,00
2.8.4	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat	1). Rasio Desa Inovatif (%)	0,68
		2). Rasio Kab/Kota Inovatif (%)	100
		3). Rasio Klaster Inovatif (%)	85,71
2.9	Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).		
2.9.1	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	1). Persentase penanganan PMKS (%)	0,69
		2). Persentase penguatan kapasitas PSKS (%)	1,64
3.1	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, profesional,		

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima		
3.1.1	Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	-
3.2	Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel		
3.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Indek Persepsi Korupsi	-
3.3	Melaksanakan penegakkan hukum		
3.3.1	Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase penindakan pelanggaran Perda (%)	100
4.1	Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama		
4.1.1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan (%)	100
4.2	Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat		
4.2.1	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik	Persentase kesiapsediaan komponen pendukung dan cadangan (%)	100
4.3	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat		
4.3.1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah	70,50
4.4	Mewujudkan Budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada		

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	semua aspek kehidupan		
4.4.1	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	Prosentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,42
5.1	Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan		
5.1.1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Persentase pelaksanaan <i>rembug</i> masyarakat dalam pengambilan keputusan (%)	100
5.2	Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat		
5.2.1	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	1) Indeks Gini	0,337
		2) Indeks Wiliamson	0,6986
6.1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
6.1.1	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	1). Angka Harapan Hidup (AHH)	75,57
6.1.2	Menurunnya Drop out dan Unmet Need serta Meningkatnya peserta KB Aktif/ <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	1). Persentase <i>Drop out</i> Peserta KB (%)	13,50
		2). Persentase <i>Unmet Need</i> (%)	9,00
		3). Persentase <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (%)	80
6.2	Meningkatnya ketersediaan, kesempatan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan		
6.2.1	Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan	1). Rata-rata lama sekolah	7,15
		2). Harapan lama sekolah	13,35
6.2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka kelulusan SMA/ SMALB/MA/ SMK	99,99

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6.3	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat		
6.3.1	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1). Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan provinsi (%)	5%
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman		
6.4.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, perumahan layak huni	1). Cakupan layanan air minum perkotaan (%)	79,50
		2). Cakupan layanan air minum perdesaan (%)	72,50
		3). Cakupan layanan sanitasi (%)	81,50
		4). Rasio rumah layak huni (%)	78,78
6.5	Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas		
6.5.1	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	1). Persentase jaringan irigasi baik (%)	82
		2). Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (%)	60,80
7.1	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi		
7.1.1	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	1). Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	89,60
		2). Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m (%)	77,87
		3). Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton) (%)	82,30
		4). Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik (%)	85,80
7.2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi		
7.2.1	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	1) Prosentase ruang publik berfasilitas hotspot/wifi	-
7.3	Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan		

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7.3.1	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	1). Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	30
		2). Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,93
7.4	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana		
7.4.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Desa)	68

Semarang, Januari 2018


GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

n a m a : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

jabatan : GUBERNUR JAWA TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang,

2019

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Lampiran : Perjanjian Kinerja Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2019

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Tujuan :			
	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00
	Sasaran :			
1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1) Indeks Toleransi	Angka	74,40
		2) Persentase tindak pidana yang tertangani	%	80,00
	Misi 2 : Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota			
	Tujuan :			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75,50
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00
		2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,76
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1) Nilai SAKIP	Angka	80,00
		2) Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,45
		3) Opini BPK	Opini	WTP
3	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1) Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	17,00
		2) Indeks Sistem Merit	Angka	0,67

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran			
	Tujuan 1:			
	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	1) Angka Kemiskinan	Angka	10,57-9,57
		2) Indeks Gini	Angka	0,35
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1) Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,54
		2) Persentase penduduk miskin pedesaan	%	12,74
		3) Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	464,81
		4) Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,85
		5) Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,75
2	Menurunnya pengangguran terbuka	1) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,43
		2) Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,70
	Tujuan 2:			
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1) Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,7
		2) Inflasi	%	3,5±1
		3) PDRB per kapita	Juta Rupiah	37,44
		4) Indeks Williamson	Angka	0,60

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
	Sasaran :			
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1) Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,90
		2) Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,85
		3) Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,67
		4) Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,15
		5) pertumbuhan investasi	%	9,00
		6) Nilai Tukar Petani	Angka	101,20
		7) Nilai Tukar Petani	Angka	101,20
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan			
	Tujuan 1:			
	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,60
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,31
		2) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,06
3	Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,00
	Tujuan 2 :			
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,69
	Sasaran :			
1	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1) Indeks Kualitas Air	Angka	48,77
		2) Indeks Kualitas Udara	Angka	84,51
		3) Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76
2	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,52

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	915.896.399.000
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.338.411.000
3	Pembinaan Pendidikan Khusus	29.548.447.000
4	Pembinaan SMK	841.667.241.000
5	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	308.489.628.000
6	Pembinaan SMA	826.118.768.000
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	14.018.249.000
8	Pembinaan Kebudayaan	18.351.175.000
9	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	8.445.430.000
10	Pelayanan Kesehatan	489.885.525.000
11	Sumber Daya Kesehatan	46.860.764.000
12	Kesehatan Masyarakat	19.063.710.000
13	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	2.075.026.000
14	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)	1.291.600.000.000
15	Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	59.401.860.000
16	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan	410.740.640.000
17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi	255.879.442.000
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	19.573.688.000
19	Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya	54.910.725.000
20	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi	23.310.000.000
21	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi	12.196.071.000
22	Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku	123.230.122.000
23	Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir	83.898.458.000
24	Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA	17.001.269.000
25	Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.815.000.000
26	Pembangunan Perumahan	6.510.000.000
27	Penanganan Kawasan Permukiman	5.165.000.000
28	Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.895.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
29	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1.865.000.000
30	Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah	2.150.000.000
31	Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.390.000.000
32	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1.075.000.000
33	Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih	8.750.000.000
34	Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	31.220.263.000
35	Program Penguatan Ketahanan Bangsa	5.860.000.000
36	Program Penguatan Politik Dalam Negeri	9.935.000.000
37	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	17.930.000.000
38	Rehabilitasi Sosial	61.748.697.000
39	Penanganan Fakir Miskin	2.400.000.000
40	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.800.000.000
41	Pemberdayaan Sosial	6.900.000.000
42	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.289.099.000
43	Peningkatan Kesempatan Kerja	6.731.108.000
44	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3.543.767.000
45	Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	4.735.760.000
46	Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi	3.082.346.000
47	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	9.394.570.000
48	Perlindungan Perempuan Dan Anak	2.763.530.000
49	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	6.149.619.000
50	Keluarga Sejahtera	1.139.215.000
51	Peningkatan Ketahanan Pangan	19.070.000.000
52	Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	16.168.648.000
53	Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas	2.580.000.000
54	Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan	32.330.664.000
55	Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan	15.751.747.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	Kehutanan	
56	Pemanfaatan Hutan	3.340.475.000
57	Penataan Administrasi Kependudukan	5.057.538.000
58	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	4.100.000.000
59	Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1.950.000.000
60	Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	5.135.000.000
61	Pengembangan Perhubungan Darat	129.181.634.000
62	Pengembangan Perhubungan Laut	2.676.000.000
63	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.014.250.000
64	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	22.916.250.000
65	Pengembangan E-Government	4.534.714.000
66	Pengembangan Data Statistik Sektor dan Keterbukaan Informasi	3.173.550.000
67	Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah	1.081.322.000
68	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	5.558.340.000
69	Pemasyarakatan Perkoperasian	2.886.660.000
70	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	2.350.000.000
71	Pendidikan Perkoperasian dan UKM	16.296.780.000
72	Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM	1.905.000.000
73	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM	17.355.000.000
74	Peningkatan Produktivitas KUKM	2.490.000.000
75	Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM	9.870.000.000
76	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	1.450.200.000
77	Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal	3.097.680.000
78	Pelayanan Perijinan	1.391.700.000
79	Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	1.431.620.000
80	Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan	1.337.630.000
81	Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan	1.458.670.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
	Perijinan	
82	Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Lembaga Kepemudaan	12.273.250.000
83	Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1.250.000.000
84	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga	3.425.000.000
85	Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	77.581.000.000
86	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Keolahragaan	409.723.750.000
87	Pengembangan Destinasi Pariwisata	25.686.943.000
88	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	17.000.000.000
89	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5.768.772.000
90	Pengembangan Perpustakaan	1.435.000.000
91	Pengelolaan Perpustakaan	4.320.000.000
92	Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan	1.319.000.000
93	Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	1.580.000.000
94	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan	671.000.000
95	Pengembangan Perikanan Tangkap	20.400.000.000
96	Program Usaha dan Pengembangan Komoditas	11.200.000.000
97	Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut	5.050.000.000
98	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	13.975.000.000
99	Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	5.300.000.000
100	Pengembangan Agribisnis	145.677.712.000
101	Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian	6.105.000.000
102	Pengembangan Agribisnis Peternakan	68.127.044.000
103	Pengembangan Ketenagalistrikan	16.309.015.000
104	Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	4.183.700.000
105	Pengelolaan Pertambangan Minerba	7.148.320.000
106	Pengembangan Kegeologian	12.800.150.000
107	Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor	2.550.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
108	Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	3.565.000.000
109	Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen	3.540.000.000
110	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	7.946.165.000
111	Penguatan dan Pengembangan Industri Agro	6.575.000.000
112	Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro	4.315.000.000
113	Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif	750.000.000
114	Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu	304.000.000
115	Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki	5.145.000.000
116	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.500.000.000
117	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya	2.984.990.000
118	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	3.000.000.000
119	Perencanaan Pembangunan Daerah	7.700.000.000
120	Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah	12.195.924.000
121	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	61.786.022.000
122	Pengelolaan Keuangan Daerah	21.791.546.000
123	Pengelolaan Aset Daerah	8.063.318.000
124	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	20.858.950.000
125	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi	2.205.212.000
126	Pengembangan Kompetensi ASN	91.597.170.000
127	Sertifikasi Kompetensi ASN	724.452.000
128	Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat	12.250.448.000
129	Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP	200.000.000
130	Pembangunan Budaya Integritas	2.036.295.000
131	Peningkatan Manajemen Mutu	1.346.573.000
132	Program Manajemen Resiko	1.277.030.000
133	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.851.088.000
134	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000.000
135	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	34.524.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)
136	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	3.573.000.000
137	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.134.729.000
138	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.685.290.000
139	Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	25.690.000.000
140	Peningkatan Layanan Kedewanan	97.545.094.000
141	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	1.915.000.000
142	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	2.425.000.000

Semarang, 2019


GUBERNUR JAWA TENGAH
H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP